



BPHN

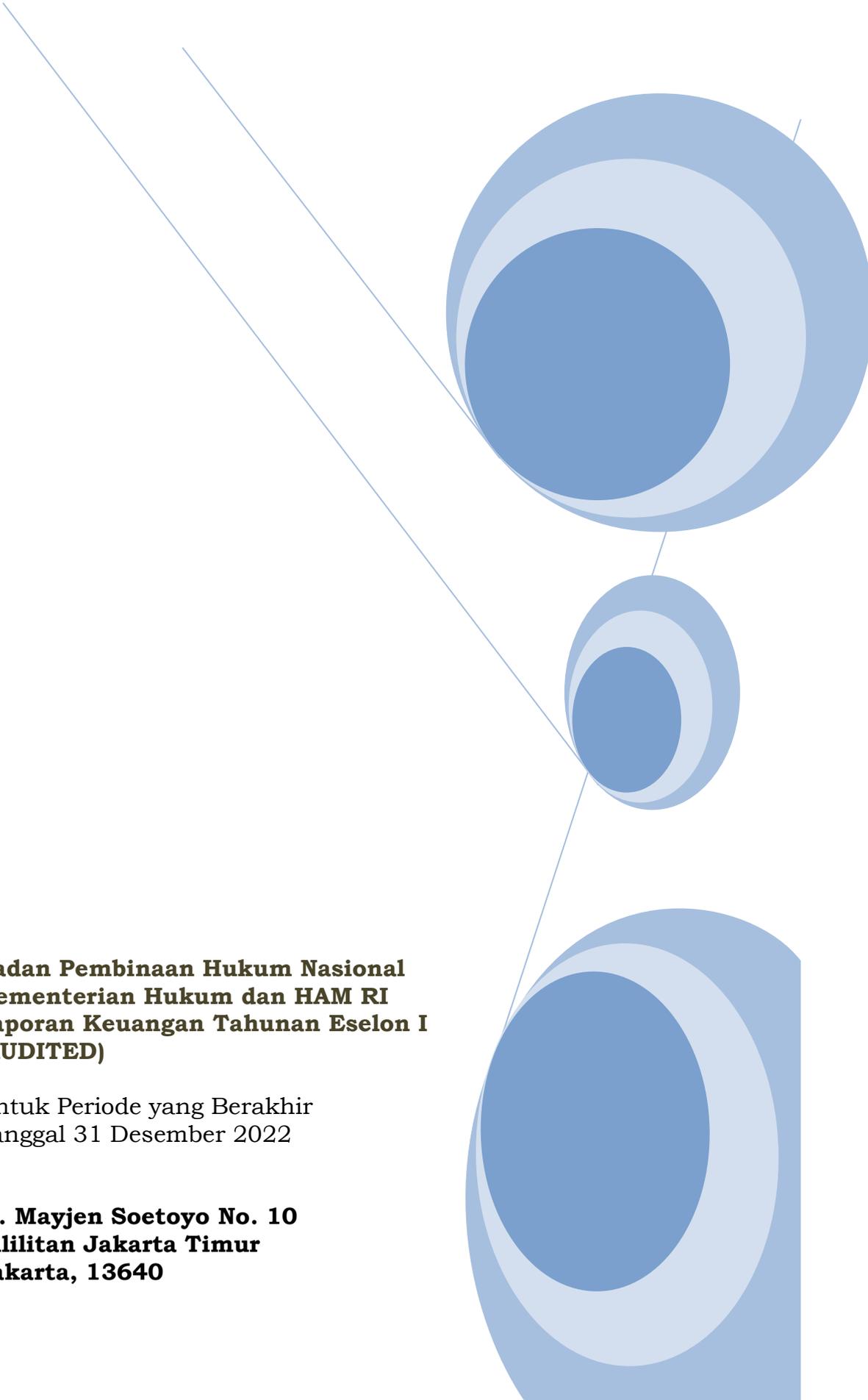
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAPORAN KEUANGAN BPHN ESELON 1 TAHUNAN (AUDITED) 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
JL. MAYJEND SOETOYO NO.10 CILILITAN , JAKARTA TIMUR 13640



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI
Laporan Keuangan Tahunan Eselon I
(AUDITED)**

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2022

**Jl. Mayjen Soetoyo No. 10
Cililitan Jakarta Timur
Jakarta, 13640**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

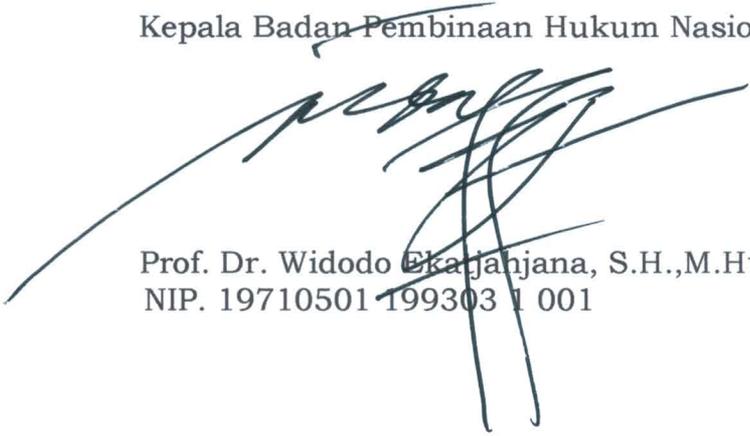
Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Widodo Eka Jahjana, S.H., M.Hum
NIP. 19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

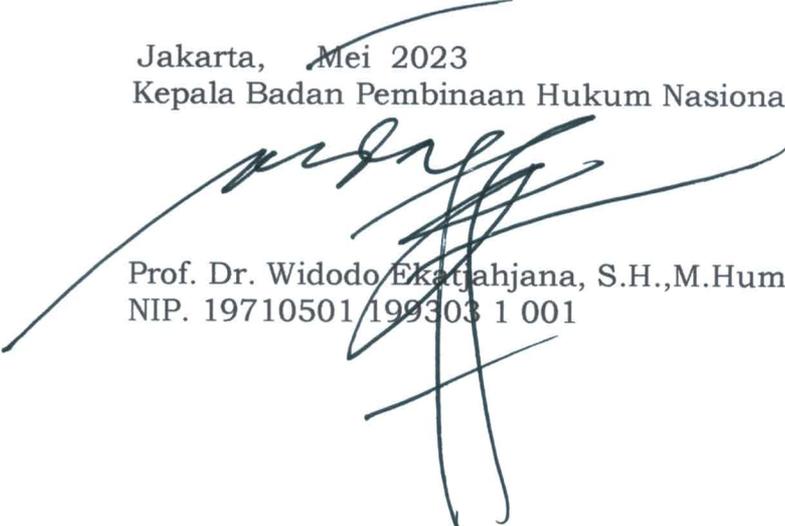
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	60
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	76
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	86
F. Pengungkapan Penting Lainnya	93
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2023
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum
NIP. 19710501 199303 1 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp71.416.520 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp87.651.588.906 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp89.011.069.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp400.354.438.694 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp98.063.299; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp400.256.375.395; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp116.771.680 dan Rp400.237.667.014.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.512.140, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp90.882.800.901 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp90.870.288.761). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp67.251.520 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp90.803.037.241).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp403.693.026.368 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp90.803.037.241) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp49.538.524) dan transaksi antar entitas senilai Rp87.397.216.411 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp400.237.667.014.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	71.416.520	0	70.061.007
JUMLAH PENDAPATAN		0	71.416.520	0	70.061.007
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	17.302.977.000	16.897.721.259	98	17.008.065.691
Belanja Barang	B.3	68.943.509.000	67.991.580.417	99	82.723.945.560
Belanja Modal	B.4	2.764.583.000	2.762.287.230	100	2.389.917.987
JUMLAH BELANJA		89.011.069.000	87.651.588.906	98	102.121.929.238

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	10.515.900
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	-	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3	0	4.165.000
Persediaan	C.4	98.063.299	214.599.942
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	
Jumlah Aset Lancar		98.063.299	229.280.842
ASET TETAP			
Tanah	C.5	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.6	24.758.430.869	22.425.453.956
Gedung dan Bangunan	C.7	59.683.830.714	59.485.084.562
Aset Tetap Lainnya	C.8	1.088.776.559	1.041.978.369
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.9	(41.440.019.747)	(35.538.489.374)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.10	-	0
Jumlah Aset Tetap		400.256.375.395	403.579.384.513
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.11	4.184.325.500	4.184.325.500
Aset Lain-Lain	C.12	853.242.316	2.070.732.320
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.13	(5.037.567.816)	(6.252.257.820)
Jumlah Aset Lainnya		-	2.800.000
JUMLAH ASET		400.354.438.694	403.811.465.355
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	107.413.285	86.052.552
Utang yang Belum Ditagihkan	C.15	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.16	9.358.395	21.870.535
Uang Muka dari KPPN	C.17	-	10.515.900
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.18	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		116.771.680	118.438.987
JUMLAH KEWAJIBAN		116.771.680	118.438.987
EKUITAS			
Ekuitas	C.19	400.237.667.014	403.693.026.368
JUMLAH EKUITAS		400.237.667.014	403.693.026.368
JUMLAH EKUITAS		400.237.667.014	403.693.026.368
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		400.354.438.694	403.811.465.355

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	12.512.140	13.068.323
JUMLAH PENDAPATAN		12.512.140	13.068.323
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	16.897.721.259	17.008.065.691
Beban Persediaan	D.3	618.639.650	532.836.893
Beban Barang dan Jasa	D.4	49.519.821.979	62.713.158.811
Beban Pemeliharaan	D.5	3.354.965.899	2.710.578.417
Beban Perjalanan Dinas	D.6	14.636.050.265	16.727.471.243
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	5.855.601.849	5.538.950.831
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	0	0
JUMLAH BEBAN		90.882.800.901	105.231.061.886
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(90.870.288.761)	(105.217.993.563)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	50.001.111	43.669.000
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		50.001.111	43.669.000
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17.250.409	1.402.007
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		17.250.409	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		67.251.520	45.071.007
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(90.803.037.241)	(105.172.922.556)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.10	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(90.803.037.241)	(105.172.922.556)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	403.693.026.368	406.657.852.575
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(90.803.037.241)	(105.172.922.556)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(49.538.524)	-3661320
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	(49.538.524)	(3.661.320)
LAIN-LAIN	E.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	87.397.216.411	102.211.757.669
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(3.455.359.354)	(2.964.826.207)
EKUITAS AKHIR	E.8	400.237.667.014	403.693.026.368

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
4. Pelaksanaan administrasi BPHN
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;

3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretarian Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah 34 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
1	10	0199	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1	-	1
2	10	0100	408727	KANWIL DKI JAKARTA	-	1	1
3	10	0200	408737	KANWIL JAWA BARAT	-	1	1
4	10	0300	408749	KANWIL JAWA TENGAH	-	1	1
5	10	0400	409187	KANWIL DI YOGYAKARTA	-	1	1
6	10	0500	408759	KANWIL JAWA TIMUR	-	1	1
7	10	0600	408789	KANWIL ACEH	-	1	1
8	10	0700	408769	KANWIL SUMATERA UTARA	-	1	1
9	10	0800	408799	KANWIL SUMATERA BARAT	-	1	1
10	10	0900	408809	KANWIL RIAU	-	1	1
11	10	1000	409166	KANWIL JAMBI	-	1	1
12	10	1100	408819	KANWIL SUMATERA SELATAN	-	1	1
13	10	1200	408829	KANWIL LAMPUNG	-	1	1

NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
14	10	1300	408839	KANWIL KALIMANTAN BARAT	-	1	1
15	10	1400	409197	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	-	1	1
16	10	1500	408848	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	-	1	1
17	10	1600	408859	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	-	1	1
18	10	1700	408869	KANWIL SULAWESI UTARA	-	1	1
19	10	1800	409217	KANWIL SULAWESI TENGAH	-	1	1
20	10	1900	408779	KANWIL SULAWESI SELATAN	-	1	1
21	10	2000	409207	KANWIL SULAWESI TENGGARA	-	1	1
22	10	2100	408899	KANWIL MALUKU	-	1	1
23	10	2200	408879	KANWIL BALI	-	1	1
24	10	2300	409227	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	-	1	1
25	10	2400	408889	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1
26	10	2500	408909	KANWIL PAPUA	-	1	1
27	10	2600	409177	KANWIL BENGKULU	-	1	1
28	10	2800	649029	KANWIL MALUKU UTARA	-	1	1
29	10	2900	648996	KANWIL BANTEN	-	1	1
30	10	3000	649008	KANWIL BANGKA BELITUNG	-	1	1
31	10	3100	649017	KANWIL GORONTALO	-	1	1
32	10	3200	667789	KANWIL KEPULAUAN RIAU	-	1	1
33	10	3300	667779	KANWIL PAPUA BARAT	-	1	1
34	10	3400	667799	KANWIL SULAWESI BARAT	-	1	1
JUMLAH					1	33	34

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah

basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (*Unaudited*). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan

menggunakan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adapun beberapa proses revisi DIPA Badan pembinaan Hukum Nasional :

1. Terdapat pengurangan Anggaran Belanja Pegawai pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp250.000.000 untuk pemenuhan pergeseran kelebihan belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan Nomor SEK.3-KU.01.02-283 tanggal 06 Juli 2022 perihal Permintaan Pemenuhan Data Dukung Revisi DIPA Belanja Pegawai TA 2022, Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-01.02-25 tanggal 18 Juli 2022 perihal Inventarisasi Perkiraan Kelebihan Belanja Pegawai BPHN TA 2022, Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-02 tanggal 18 Juli 2022 perihal Persetujuan Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai BPHN TA 2022 dan Surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-27 tanggal 19 Juli 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 (Dokumen revisi beserta surat disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).
2. Pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat program *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2022 sebanyak 2 (dua) tahap sebesar Rp33.414.588.000 yaitu :
 - Tahap 1 (pertama) sebesar Rp32.776.841.000 sesuai dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-33 tanggal 09 Desember 2021 perihal Penyampaian *Automatic Adjustment* Belanja TA 2022 Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Nomor PHN-PR.01.04-35 tanggal 10 Desember 2021 perihal Usulan Revisi Anggaran *Automatic Ajustment* BPHN TA 2022

- Tahap 2 (dua) sebesar Rp637.747.000 pada tahap 2 (dua) sesuai dengan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-02 tanggal 31 Mei 2022 perihal Penyampaian Tambahan *Automatic Adjustment* TA 2022 Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Nomor PHN-PR.01.04-04 tanggal 02 Juni 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran Tambahan *Automatic Adjustment* BPHN TA 2022. Rincian program *Automatic Adjustment* tersaji dalam table berikut :

Rincian Automatic Adjustment
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Tahun Anggaran 2022

No	KODE	JENIS KEGIATAN	PAGU	AA I	AA II	TOTAL AA	PAGU SETELAH AA
1	1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	507.958.000	126.650.000	634.608.000	1.117.683.000
2	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	955.452.000	117.530.000	1.072.982.000	1.845.408.000
3	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.069.752.000	109.230.000	1.178.982.000	1.641.370.000
4	1613	Perencanaan Hukum Nasional	1.627.799.000	573.084.000	95.472.000	668.556.000	959.243.000
5	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.343.144.000	7.641.298.000	188.865.000	7.830.163.000	32.512.981.000
6	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67.355.087.000	21.392.449.000	-	21.392.449.000	45.962.638.000
7	5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum Di Wilayah	4.739.108.000	636.848.000	-	636.848.000	4.102.260.000
TOTAL			121.556.171.000	32.776.841.000	637.747.000	33.414.588.000	88.141.583.000

Rincian program *Automatic Adjustment* pada masing-masing satuan kerja dapat dilihat dalam lampiran laporan keuangan ini.

3. Pada bulan Juli 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja mengajukan usulan pembukaan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp869.486.000 melalui surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-92 Tanggal 20 Juli 2022 perihal Usulan Buka Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* di Lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2022 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan pada bulan September 2022 sesuai

dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-476/AG/AG.5/2022 tanggal 23 September 2022 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Buka Blokir *Automatic Adjustment* BPHN TA 2022.

Berikut adalah tabel Anggaran DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 setelah buka blokir *Automatic Adjustment*:

Rincian Buka Blokir *Automatic Adjustment*

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Tahun Anggaran 2022

No	KODE	JENIS KEGIATAN	PAGU	AA I	AA II	TOTAL AA	PAGU SETELAH AA	BUKA BLOKIR	PAGU SETELAH BUKA BLOKIR
1	1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	507.958.000	126.650.000	634.608.000	1.117.683.000	173.588.000	1.291.271.000
2	1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	955.452.000	117.530.000	1.072.982.000	1.845.408.000	255.000.000	2.100.408.000
3	1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.069.752.000	109.230.000	1.178.982.000	1.641.370.000	300.000.000	1.941.370.000
4	1613	Perencanaan Hukum Nasional	1.627.799.000	573.084.000	95.472.000	668.556.000	959.243.000	-	959.243.000
5	1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.343.144.000	7.641.298.000	188.865.000	7.830.163.000	32.512.981.000	140.898.000	32.653.879.000
6	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67.355.087.000	21.392.449.000	-	21.392.449.000	45.962.638.000	-	45.962.638.000
7	5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum Di Wilayah	4.739.108.000	636.848.000	-	636.848.000	4.102.260.000	-	4.102.260.000
TOTAL			121.556.171.000	32.776.841.000	637.747.000	33.414.588.000	88.141.583.000	869.486.000	89.011.069.000

Sehubungan dengan implementasi kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka memenuhi kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun, Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2022 yang Terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disusuli dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-PR.04.01-121 tanggal 22 November 2022 perihal Penyampaian Realokasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyampaikan Data Dukung Reviu Usulan Revisi Realokasi sesuai dengan surat Sekretaris

Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-PR.01.04-142 tanggal 23 November 2022 perihal Penyampaian Data Dukung Reviu Usulan Revisi Realokasi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dan telah mendapatkan hasil reviu dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Nomor ITJ.PW.05.01.IV-19 tanggal 30 November 2022 serta mendapatkan pengesahan dari Kementerian Keuangan sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-681/AG/AG.5/2022 tanggal 01 Desember 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Realokasi Sisa *Automatic Adjustment* BPHN Kemenkumham TA 2022 (dokumen Realokasi beserta surat disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).

Perubahan anggaran tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	-	-
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Iuran dan Denda	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	17.552.977.000	17.302.977.000
Belanja Barang	94.824.861.000	68.943.509.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	9.428.333.000	2.764.583.000
Jumlah Belanja	121.806.171.000	89.011.069.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.752.291.000	1.291.271.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.918.390.000	2.100.408.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.820.352.000	1.941.370.000
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	1.627.799.000	959.243.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	40.593.144.000	32.653.879.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	67.355.087.000	45.962.638.000
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	4.739.108.000	4.102.260.000
Total Belanja	121.806.171.000	89.011.069.000

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya melalui satu Program prioritas, yaitu program Bantuan Hukum melalui Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi, yang tersebar di 33 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp36.383.520.000 dan realisasi sebesar Rp36.005.790.148 atau 98,96%. Rincian program Kegiatan Prioritas Nasional Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi untuk masing-masing satuan kerja disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini (terlampir).

Pada tahun 2022 ini Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, anggaran semula sebesar Rp1.538.034.000 menjadi sebesar Rp634.515.000. Rincian realokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	URAIAN	2022	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	111.012.000	212.522.000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	39.921.000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	25.840.000	24.750.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.401.182.000	357.322.000
Total Belanja		1.538.034.000	634.515.000

Rincian realokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

*Realisasi
Pendapatan.
Rp71.416.520*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp71.416.520 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat estimasi pendapatan dikarenakan bukan merupakan pendapatan yang bersifat rutin sehingga tidak dapat diestimasi besarnya. Pendapatan rutin pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berasal dari sewa kantin yang dibayarkan setiap 2 tahun sekali. Pendapatan sewa kantin pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional disetorkan pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah atau Bangunan Nomor PHN1-UM.03.06-32 tanggal 1 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Periode 31 Desember 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	50.001.111	0
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan	0	4.165.000	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.343.009	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6.907.400	0
Jumlah	0	71.416.520	0

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,93 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan lelang pada kantor Badan pembinaan Hukum nasional selaku satuan kerja, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu serta penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	50.001.111	43.669.000	14,50
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.165.000	24.990.000	(83,33)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.343.009	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.907.400	1.402.007	392,68
Jumlah	71.416.520	70.061.007	1,93

Rincian Jenis Pendapatan berdasarkan

Satuan Kerja/Wilayah

URAIAN	SATUAN KERJA	REALISASI T.A. 2022
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	BPHN	50,001,111
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		4,165,000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		10,343,009
		3,600,000
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Kantor Wilayah Papua	1,307,400
	Kantor Wilayah Aceh	2,000,000
Jumlah		71,416,520

Rincian Realisasi Pendapatan sebesar Rp71.416.520 adalah sebagai berikut :

1. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp68.109.120 berupa :

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 berupa hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022;
- Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran sewa kantin BPHN untuk Bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2022 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reinal Saputra sebesar Rp2.255.600 sesuai NTPN nomor 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022;

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pembulatan gaji sebesar Rp9 melalui potongan SPM nomor 00006T/409 288/2022 tanggal 21 Januari 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sebesar Rp8.087.400 sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran perawatan AC Split Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000 sesuai dengan NTPN nomor ODCA561QUH4DFDGE tanggal 11 Maret 2022.
2. Pada Kantor Wilayah Papua sebesar Rp1.307.400 berupa :
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp1.200.000 berupa pengembalian transport lokal dan pemantauan a.n. Agosto Prawar sesuai NTPN nomor 266702G4V6RFS4C8 tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp35.800 kegiatan fasilitasi penyusunan NA sesuai NTPN nomor EE70B8N3E0S6NA2B tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp71.600 kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu sesuai NTPN nomor FDB211JNFC93FANV tanggal 30 Maret 2022.
3. Pada Kantor Wilayah Aceh sebesar Rp2.000.000 berupa pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu atas duplikasi belanja pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh sesuai NTPN B0EEB0N9VIEB6SHC

tanggal 25 November 2022.

Realisasi Belanja
Rp87.651.588.906

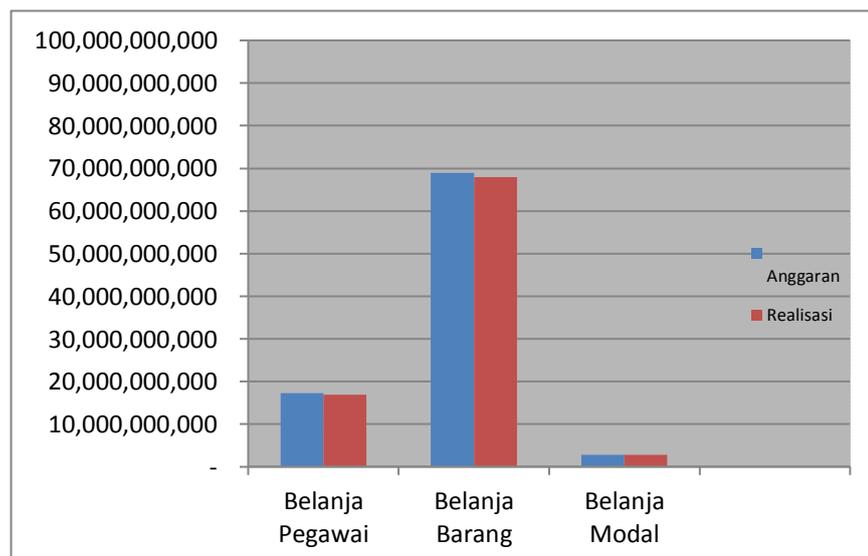
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp87.651.588.906 atau 98,89% dari anggaran belanja sebesar Rp89.011.069.000. Realisasi belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Eselon I terdiri 34 Satuan Kerja yaitu BPHN selaku satuan kerja dan 33 Kantor Wilayah mencapai realisasi sebesar 98,47%. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Periode 31 Desember 2022

URAIAN	2022		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	17.302.977.000	17.130.876.404	99,01
Belanja Barang	68.943.509.000	68.131.585.616	98,82
Belanja Modal	2.764.583.000	2.762.287.230	99,92
Total Belanja Kotor	89.011.069.000	88.024.749.250	98,89
Pengembalian Belanja	-	(373.160.344)	0
Total Belanja	89.011.069.000	87.651.588.906	98,47

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Berdasarkan Program

Periode 31 Desember 2022

PROGRAM	2022	
	ANGGARAN	REALISASI
Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.291.271.000	1.275.516.852
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.100.408.000	2.062.089.725
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	1.941.370.000	1.888.960.107
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	959.243.000	947.094.571
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	32.653.879.000	32.163.703.100
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	45.962.638.000	45.364.464.181
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	4.102.260.000	3.949.760.370
Total Belanja	89.011.069.000	87.651.588.906

Dibandingkan dengan 31 Desember 2021, Realisasi Belanja periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 14,17% hal ini disebabkan karena adanya realokasi anggaran *Automatic Adjustment* sehingga anggaran tahun 2022 lebih kecil dibandingkan anggaran tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.897.721.259	17.008.065.691	(0,65)
Belanja Barang	67.991.580.417	82.723.945.560	(17,81)
Belanja Modal	2.762.287.230	2.389.917.987	15,58
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	87.651.588.906	102.121.929.238	(14,17)

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp634.515.000. Anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp568.838.872 atau 89,65% dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Belanja Penanganan Pandemi COVID-19
Berdasarkan Akun Periode 31 Desember 2022*

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	212.522.000	210.201.381	98,91
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	39.921.000	39.737.900	99,54
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	24.750.000	24.728.329	99,91
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	357.322.000	294.171.262	82,33
Jumlah		634.515.000	568.838.872	89,65

*Perbandingan Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	210.201.381	552.549.312	(61,96)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.737.900	35.339.280	0,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.728.329	43.550.390	(43,22)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	294.171.262	614.319.077	(52,11)
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor		568.838.872	1.288.289.559	(55,85)
Pengembalian		-	(9.387.000)	-
Jumlah Belanja		568.838.872	1.278.902.559	(55,52)

Realisasi Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 periode 31 Desember TA. 2022 mengalami penurunan sebesar 55,52% dari TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena anggaran belanja barang penanganan pandemi COVID-19 tahun 2022

lebih kecil dan adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait Pandemi COVID-19. Rincian realisasi belanja barang untuk masing-masing satuan kerja disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Belanja Pegawai
Rp16.897.721.259

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.897.721.259 dan Rp17.008.065.691 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Anggaran dan realisasi belanja pegawai disajikan pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Periode 31 Desember 2022*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.033.122.000	16.872.026.404	99,05
Belanja Lembur	269.855.000	258.850.000	95,92
Jumlah Belanja Kotor	17.302.977.000	17.130.876.404	99,01
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(233.155.145)	-
Jumlah Belanja	17.302.977.000	16.897.721.259	97,66

Terdapat pengembalian belanja pegawai TA 2022 pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp233.155.145 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.665 melalui potongan SPM;
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT Pengelola Barang dan Jasa atas nama Kartika Butar Butar dan Shanaz Iriani sebesar Rp370.000 melalui potongan SPM;

3. Pengembalian Belanja Tunjangan Suami PNS Bulan Januari 2022 a.n Pegawai Marthina W sebesar Rp295.060 sesuai NTPN nomor 04D495uDPHI2VK7U tanggal 23 Februari 2022;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Beras Suami PNS Bulan Januari 2022 a.n Marthina W sebesar Rp72.420 sesuai NTPN nomor E1AA57N8P6MRPIUO tanggal 23 Februari 2022;
5. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS 1 pegawai a.n Dwi Agustin dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT sebesar Rp2.160.000 melalui potongan SPM;
6. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS 30 Pegawai dikarenakan sudah dilantik sebagai JFT sebesar Rp21.090.000 melalui potongan SPM.
7. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS sebesar Rp177.120.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk Bulan Januari-November 2022 sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;
8. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural PNS THR sebesar Rp14.040.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;
9. Pengembalian Belanja Tunjangan Struktural Gaji ke-13 sebesar Rp17.820.000 dikarenakan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi

yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, sebanyak 33 pegawai melalui potongan SPM;

10. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS Pegawai sebesar Rp185.000 karena dilantik menjadi JFT Pengadaan Barang dan Jasa a.n Nur Pramesti melalui potongan SPM.

Realisasi belanja pegawai pada kantor BPHN periode 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 0,65 % dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini adanya pengembalian belanja tunjangan struktural PNS akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.05/2022 tentang tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi pegawai negeri sipil di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.872.026.404	16.845.224.571	0,16
Belanja Lembur	258.850.000	166.106.000	55,83
Jumlah Belanja Kotor	17.130.876.404	17.011.330.571	0,70
Pengembalian Belanja Pegawai	(233.155.145)	(3.264.880)	7.041,31
Jumlah Belanja	16.897.721.259	17.008.065.691	(0,65)

*Belanja Barang
Rp67.991.580.417*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp67.991.580.417 dan Rp82.723.945.560. Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 tersaji dalam table berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Periode 31 Desember 2022

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	3.649.659.000	3.645.475.256	99,89
Belanja Barang Non Operasional	42.587.142.000	42.163.011.537	99,00
Belanja Barang Persediaan	584.190.000	583.180.152	99,83
Belanja Jasa	3.883.670.000	3.807.345.053	98,03
Belanja Pemeliharaan	3.279.755.000	3.273.888.754	99,82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.958.251.000	14.658.684.864	98,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	842.000	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	68.943.509.000	68.131.585.616	98,82
Pengembalian Belanja	-	(140.005.199)	-
Jumlah Belanja	68.943.509.000	67.991.580.417	98,62

Pada Tahun 2022 terdapat pengembalian belanja barang di Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp140.005.199 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp6.000.000 berupa:
 - Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi sebesar Rp3.000.000 sesuai NTPN CDADE395A1R7878R tanggal 22 Desember 2022;
 - Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi sebesar Rp3.000.000 sesuai NTPN 8A53C45IPSDJM9TS tanggal 22 Desember 2022;
2. Kantor Wilayah Yogyakarta berupa pengembalian belanja pembayaran Bantuan Hukum litigasi LBH Universitas Ahmad Dahlan sebesar Rp2.000.000 sesuai NTPN K30608JM919KS6HH tanggal 23 September 2022;
3. Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp105.572 berupa :
 - Pengembalian belanja barang berupa biaya transport perjalanan dinas tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp39.530 sesuai NTPN BF1DA8JM919CUOVN tanggal 20 Juli 2022;
 - Pengembalian belanja barang berupa biaya transport perjalanan dinas tanggal 27 sd 28 Juni 2022 ke

Sumenep sebesar Rp66.042 sesuai NTPN 656D77N8P6N0HJVM tanggal 20 Juli 2022;

4. Kantor Wilayah Aceh sebesar Rp23.400.000 berupa :
 - Pengembalian belanja kegiatan bantuan hukum litigasi sebesar Rp12.000.000 sesuai NTPN 7222A0JSQI413708 tanggal 21 november 2022;
 - Pengembalian belanja kegiatan bantuan hukum non litigasi sebesar Rp5.700.000 sesuai NTPN EFA215UDP11ID117MK tanggal 22 November 2022;
 - Pengembalian belanja kegiatan bantuan hukum non litigasi sebesar Rp5.700.000 sesuai NTPN 5CCDE0JSQI413109 tanggal 24 November 2022;
5. Kantor Wilayah Sumatera Utara sebesar Rp51.000.000 berupa :
 - Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi kepada OBH sebesar Rp20.580.000 sesuai NTPN 5D3722CNQ78MUHPU tanggal 09 Agustus 2022;
 - Pengembalian pajak belanja bantuan hukum litigasi kepada OBH sebesar Rp420.000 sesuai NTPN 4DB621GAACMAHROB tanggal 09 Agustus 2022;
 - Pengembalian belanja pembayaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp30.000.000 sesuai NTPN 887F95209N003P4P tanggal 23 Desember 2022;
6. Kantor Wilayah Sumatera Barat berupa Pengembalian belanja perjadiin ke pusat tanggal 25 sampai 27 agustus 2022 ke Jakarta sesuai kuitansi LS Perjadiin 010 sebesar Rp642.720 sesuai NTPN 33A920JSQI3V5FHS tanggal 23 September 2022;
7. Kantor Wilayah Jambi sebesar Rp26.000.000 berupa pengembalian belanja kegiatan bantuan hukum litigasi sebesar Rp26.000.000 sesuai NTPN 92FA31GAACM4E50 tanggal 08 Agustus 2022;
8. Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp6.223.600 berupa :
 - Pengembalian belanja sisa perjalanan dinas narasumber sebesar Rp823.600 sesuai NTPN 0AEB75209MVQ6TSN tanggal 08 Juni 2022;

- Pengembalian pembayaran Invoice LBH APIK Sumsel No 004 13 September 2022 sebesar Rp3.000.000 sesuai NTPN 86CAD2CNQ78O18J8 tanggal 23 September 2022;
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp600.000 sesuai NTPN BFEB78JM919HNLV1 tanggal 26 desember 2022;
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp1.800.000 sesuai NTPN 352D0395A1R79E47 tanggal 26 desember 2022;
9. Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp7.230.000 berupa :
- Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa kegiatan penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah sebesar Rp6.540.000 sesuai NTPN 2462E5UDPHIBJ402 tanggal 25 November 2022;
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas biasa kegiatan penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah sebesar Rp540.000 sesuai NTPN 424F21GAAAUD71CLD tanggal 25 November 2022;
 - Pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota kegiatan penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah sebesar Rp150.000 sesuai NTPN 44ADF0JSR3QRKENK tanggal 25 November 2022;
10. Kantor Wilayah Maluku berupa pengembalian perjalanan dinas narasumber Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah atas nama Claudia sebesar Rp658.000 sesuai NTPN 4E2BF1GAACMCFFBJ tanggal 12 Oktober 2022;
11. Kantor Wilayah Papua sebesar Rp1.063.900 berupa :
- Pengembalian perjalanan dinas atas nama Andy Ardian Sannang dan Frans Capri Yogi Harianja sebesar Rp349.600 sesuai NTPN C4FB98JM9199UI8V tanggal 12 April 2022;
 - Pengembalian perjalanan dinas atas nama Andy Ardian, Diden Priya Utama, S.Kom sebesar Rp714.300 sesuai NTPN D227B5209MVOAGNF tanggal 06 April 2022;

12. Kantor Wilayah Maluku Utara sebesar Rp869.000 berupa :

- Pengembalian perjalanan dinas taksi narasumber kegiatan persiapan analisis dan evaluasi hukum sebesar Rp69.000 sesuai NTPN 63BB88JM919BUIK5 tanggal 22 Juni 2022;
- Pengembalian Belanja Hotel Tim Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah di Kab. Pulau Morotai sebesar Rp800.000 sesuai NTPN AFC805UDFHI9NOHM tanggal 05 Oktober 2022;

13. Kantor Wilayah Banten sebesar Rp5.000.000 berupa :

- Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi OBH posbakumadin Kab. Tangerang sebesar Rp3.000.000 sesuai NTPN EC4C31GAACMEEQR9 tanggal 19 Desember 2022;
- Pengembalian belanja bantuan hukum litigasi OBH LBH SIKAP sebesar Rp2.000.000 sesuai NTPN D6EA02CNQ78QRQ6C tanggal 19 Desember 2022;

14. Kantor Badan pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp9.812.407 berupa :

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang tiket dan hotel perjadiin asistensi PERDA di Sulawesi Tenggara sebesar Rp2.365.200 sesuai dengan NTPN nomor C2D718JM919EO3HB tanggal 08 September 2022;
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa Pengembalian selisih Honorarium Narasumber Kegiatan Pertemuan Nasional karena Narasumber sebesar Rp157.500 sesuai dengan NTPN 181D32CNQ78PUMCI tanggal 23 November 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Pengembalian Uang Harian Paket Meeting Fullboard Kegiatan Penyelarasan NA RUU untuk 3 hari sebesar Rp450.000 sesuai dengan NTPN nomor AB02E395A1R6BGK7 tanggal 23 November 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian selisih biaya transport dalam rangka

kegiatan Temu Pakar Konsultasi Penyusunan Naskah sebesar Rp127.128 sesuai NTPN nomor 382916QR9C4OSSCH tanggal 19 Desember 2022;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa selisih harga tiket pesawat perjalanan dinas ke Sumatera Barat dalam rangka Kegiatan Hearing Prolegnas sebesar Rp4.960 sesuai NTPN nomor 1FF4E1GAACMEFBJR tanggal 20 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang tiket pesawat perjadiin kegiatan evaluasi program kegiatan dan anggaran kegiatan BPHN TA 2022 di Kanwil Maluku sebesar Rp322.967 sesuai NTPN nomor 60D712CNQ78QT2B2 tanggal 23 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang hotel kegiatan peliputan peresmian desa sadar hukum di Bali sebesar Rp120.000 sesuai NTPN nomor D50BB2CNQ78QT87G tanggal 23 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa selisih uang hotel dan pesawat kegiatan perjadiin kegiatan analisis dan evaluasi hukum di Kanwil Bangka Belitung sebesar Rp296.600 sesuai NTPN nomor B3C1A395A1R7A3FB tanggal 23 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjadiin dalam rangka kegiatan pengumpulan dan supervisi data terkait evaluasi program anggaran dan kinerja TA 2022 sebesar Rp252.092 sesuai NTPN nomor 7BF587N8P6N5C05K tanggal 27 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan berupa Pengembalian Honorarium Anggota pokja AE Keuangan Digital sebesar Rp637.500 sesuai NTPN nomor A0ABF45IPSDJP2U0 tanggal 29 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang hotel kegiatan pengawasan organisasi bantuan hukum di Bandung sebesar Rp1.260.000 sesuai NTPN nomor F62652CNQ78QV0AG

tanggal 29 Desember 2022;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa Pengembalian uang harian 1 hari kegiatan pembahasan DPHN di Surabaya sebesar Rp410.000 sesuai NTPN nomor FDDF88JM919HQ35V tanggal 29 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota berupa selisih uang hotel eselon 2 ke eselon 4 kegiatan pembahasan DPHN di Surabaya sebesar Rp820.000 sesuai NTPN nomor 750D945IPSDJP162 tanggal 29 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Bahan berupa Pengembalian pembelian makan dan snack kegiatan penyuluhan keliling sebesar Rp5.600 sesuai NTPN nomor 29CC445IPSDJP5C4 tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Jasa Profesi berupa Pengembalian honorarium narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Hukum sebesar Rp170.000 sesuai NTPN nomor 31A067N8P6N5DD4M tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Lampung sebesar Rp250.000 sesuai NTPN nomor E2F660JSQI425D52 tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Bali sebesar Rp20.160 sesuai NTPN nomor 3B4B66QR9C4P0EG3 tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian uang penginapan eselon 2 perjalanan dinas kegiatan pembinaan penyuluh hukum di Bandung sebesar Rp425.000 sesuai NTPN nomor 4926F5209N00679D tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas peresmian Desa Sadar Hukum di Jawa barat sebesar Rp395.000 sesuai NTPN

nomor 7A7767N8P6N5DA4E tanggal 30 Desember 2022;

- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas peresmian Desa Sadarr Hukum di Bali sebesar Rp272.700 sesuai NTPN nomor E977E5209N00683V tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian perjalanan dinas pengawasan Organisasi Bantuan Hukum di Jember sebesar Rp800.000 sesuai NTPN nomor 53C067N8P6N5DBBQ tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum di Lampung sebesar Rp200.000 sesuai NTPN nomor FAA432CNQ78QV8MU tanggal 30 Desember 2022;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum di Cirebon sebesar Rp50.000 sesuai NTPN nomor E0EF345IPSDJP5J0 tanggal 30 Desember 2022;

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember TA. 2022 mengalami penurunan sebesar 17,74% dari TA 2021.

*Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3.645.475.256	3.992.831.114	(8,70)
Belanja Barang Non Operasional	42.163.011.537	54.701.225.011	(22,92)
Belanja Barang Persediaan	583.180.152	605.044.670	(3,61)
Belanja Jasa	3.807.345.053	4.057.321.430	(6,16)
Belanja Pemeliharaan	3.273.888.754	2.678.567.392	22,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	14.658.684.864	16.786.120.995	(12,67)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	68.131.585.616	82.821.110.612	(17,74)
Pengembalian Belanja	(140.005.199)	(97.165.052)	44,09
Jumlah Belanja	67.991.580.417	82.723.945.560	(17,81)

Dalam DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Program Prioritas Nasional (PN) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja barang non operasional (521219) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdapat di Kantor Wilayah, Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya sebatas memonitor sejauh mana anggaran tersebut terealisasi sesuai rencana. Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2022 sebesar Rp36.005.790.148 atau 98,96% dari Anggaran Bantuan Hukum sebesar Rp36.383.520.000 (rincian terlampir). Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp634.515.000. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp568.838.872 atau sebesar 89,65% dari yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2022*

Akun	URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
521131	Belanja Barang Operasional - Penangan Pandemi COVID-19	212.522.000	210.201.381	98,91%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.921.000	39.737.900	99,54%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi COVID-19	24.750.000	24.728.329	99,91%
522192	Belanja Jasa - Penangan Pandemi COVID-19	357.322.000	294.171.262	82,33%
	Jumlah Belanja	634.515.000	568.838.872	89,65%
	Pengembalian Belanja	0	-	0,00%
	Jumlah Belanja	634.515.000	568.838.872	89,65%

Perbandingan Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	210.201.381	552.549.312	(61,96)
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.737.900	35.339.280	0,00
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	24.728.329	43.550.390	(43,22)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	294.171.262	614.319.077	(52,11)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	568.838.872	1.288.289.559	(55,85)
Pengembalian Belanja	-	(9.387.000)	0,00
Jumlah Belanja	568.838.872	1.278.902.559	(55,52)

Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19 periode 31 Desember TA. 2022 mengalami penurunan sebesar 55,52% dari TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena alokasi anggaran tahun 2022 untuk penanganan pandemi COVID-19 lebih kecil serta perubahan-perubahan kebijakan pemerintah terkait Pandemi COVID-19.

Belanja Modal
Rp2.762.287.230

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.762.287.230 dan Rp2.389.917.987. Realisasi belanja modal Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai eselon I terdapat pada 20 Satuan Kerja yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan 19 Kantor Wilayah telah mencapai realisasi sebesar 99,92%. Dimana sebagian besar belanja modal terdapat pada Kantor BPHN selaku satuan kerja sebesar Rp2.579.331.255 dan Kantor Wilayah sebesar Rp182.955.975. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal

Periode 31 Desember 2022

Akun	URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.335.310.000	2.333.786.913	99,93%
533121	Belanja penambahan Nilai gedung dan Bangunan	198.990.000	198.746.152	99,88%
536111	Belanja Modal Lainnya	230.283.000	229.754.165	99,77%
Jumlah Belanja Bruto		2.764.583.000	2.762.287.230	99,92%
Pengembalian		0	0	0,00%
Jumlah Belanja Netto		2.764.583.000	2.762.287.230	99,92%

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022 sebesar Rp2.762.287.230 terdapat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah. Realisasi Belanja Modal ini mempengaruhi penambahan aset pada Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rincian Realisasi Belanja Modal masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp.3.993.500 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 221391301007986 tanggal 13 April 2022;
2. Kantor Wilayah Jawa Barat sebesar Rp7.249.800 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220221302008207 tanggal 10 Juni 2022;
3. Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp19.975.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220261301002424 tanggal 25 Maret 2022;
4. Kantor Wilayah Yogyakarta sebesar Rp12.999.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220301303007938 tanggal 25 Februari 2022;
5. Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp994.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 221351301012355 tanggal 25 Juli 2022;
6. Kantor Wilayah Sumatera Utara sebesar Rp18.030.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220041303001370 tanggal 01 April 2022;

7. Kantor Wilayah Sumatera Barat sebesar Rp2.475.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220101303000667 tanggal 25 Februari 2022;
8. Kantor Wilayah Riau sebesar Rp6.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220081301010552 tanggal 15 Juni 2022;
9. Kantor Wilayah Jambi sebesar Rp2.993.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220121301004535 tanggal 17 Mei 2022;
10. Kantor Wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp15.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220141303005361 tanggal 13 April 2022;
11. Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp2.945.575 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220171303006287 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp1.297.250 dan SP2D nomor 220171301016442 tanggal 02 September 2022 sebesar Rp1.648.325;
12. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp10.988.100 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220451302000761 tanggal 24 Februari 2022;
13. Kantor Wilayah Bali sebesar Rp20.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220371303003521 tanggal 02 Juni 2022 dan 220371303003870 tanggal 14 Juni 2022;
14. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sebesar Rp8.982.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220381302002372 tanggal 08 Maret 2022;
15. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp13.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220391301002744 tanggal 25 Februari 2022;
16. Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp5.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220161303000521 tanggal 17 Februari 2022
17. Kantor Wilayah Bangka Belitung sebesar Rp7.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220151303001678 tanggal 09 Agustus 2022;
18. Kantor Wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp11.831.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor

220091303000649 tanggal 22 Februari 2022;

19. Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp10.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 220651302005008 tanggal 27 Mei 2022;

20. Kantor Wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp3.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D 221781301015976 tanggal 04 Oktober 2022;

21. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp2.579.331.255 berupa :

- 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000);
- 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasanngannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);
- 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
- 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
- 2 Unit Sice untuk keperluan Kantor BPHN sebesar Rp17.982.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.782.000);
- 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);
- 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172);
- 1 Paket Buku-buku dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Hukum sebesar Rp3.677.600;
- Perbaikan Ruangan Lantai Dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022 sebesar Rp198.746.152 (sudah termasuk pajak);
- 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776

- Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);
- 1 set buku UDC (Universal Decimal Classification) sebesar Rp8.250.000 (sudah termasuk pajak);
 - 1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
 - 5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - 15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
 - 18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
 - 1 Paket Buku-Buku Hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum sebesar Rp21.139.829 (sudah termasuk pajak);
 - 1 Paket Buku-Buku Hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum sebesar Rp8.794.950 (sudah termasuk pajak);
 - 12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
 - 2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
 - 2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - 2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - 1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);
 - 2 unit alat citotec cervijet (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
 - 1 Tripod Libec 650EX Professional For Camcorder-DSLR-Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
 - 1 Tripod Libec 650EX Professional For Camcorder-DSLR-

Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);

- Perangkat Ligting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- 1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- 1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);
- 1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Realisasi Belanja Modal pada periode 31 Desember TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,58% dibandingkan TA 2021 disebabkan karena adanya penambahan alokasi anggaran belanja modal untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta penambahan belanja modal lainnya di kantor wilayah sehingga alokasi anggaran belanja modal tahun anggaran 2022 lebih besar dibanding tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.333.786.913	2.214.472.930	5,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.746.152	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	229.754.165	175.445.057	30,96
Jumlah Belanja Kotor	2.762.287.230	2.389.917.987	15,58
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	2.762.287.230	2.389.917.987	15,58

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalokasikan anggaran belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal tanah pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.333.786.913, mengalami kenaikan sebesar 5,39% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.214.472.930. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 lebih besar dibandingkan 2021 sehingga meningkatnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.333.786.913	2.171.941.430	7,45
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	0	42.531.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	2.333.786.913	2.214.472.930	5,39
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	2.333.786.913	2.214.472.930	5,39

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp2.333.786.913 berupa pembelian:

1. 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000);
2. 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasangannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);

3. 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
4. 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
6. 2 Unit Sice untuk keperluan Kantor BPHN sebesar Rp17.982.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.782.000);
7. 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);
8. 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172).
9. 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776 Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);
- 10.1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
- 11.5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 12.15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
- 13.18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
- 14.12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
- 15.2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
- 16.2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 17.2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);

- 18.1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 19.2 unit alat citotec cervijet (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
- 20.1 Tripod Libec 650EX Professional For Camcorder-DSLR- Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
21. Perangkat Lighting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- 22.1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- 23.1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);
- 24.1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Pada tahun Anggaran 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalokasikan belanja modal peralatan dan mesin untuk penanganan pandemi COVID-19.

*Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Penanganan Pandemi COVID-19
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	42,531,500	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	42,531,500	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	0	0.00
Jumlah Belanja	0	42,531,500	(100.00)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp198.746.152 dan Rp0.

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami Kenaikan 100% dari Tahun Anggaran 2021 dikarenakan tidak adanya alokasi anggaran Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp198.746.152 adalah perbaikan Ruang Lantai Dua Gedung Annex Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	198.746.152	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	198.746.152	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	198.746.152	0	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2022.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp229.754.165 dan Rp175.445.057. Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022 sebesar Rp229.754.165 berupa pembelian buku dan koleksi perpustakaan (monografi) di Kantor Wilayah sebesar Rp182.955.975 dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp46.798.190 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Perpustakaan
periode 31 Desember 2022*

No	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	BPHN	47.000.000	46.798.190	Monografi
2	Kanwil DKI Jakarta	4.000.000	3.993.500	Monografi
3	Kanwil Jawa Barat	7.250.000	7.249.800	Monografi
4	Kanwil Jawa Tengah	20.000.000	19.975.000	Monografi
5	Kanwil Yogyakarta	13.000.000	12.999.000	Monografi
6	Kanwil Jawa Timur	995.000	994.000	Monografi
7	Kanwil Sumatera Utara	18.038.000	18.030.000	Monografi
8	Kanwil Sumatera Barat	2.500.000	2.475.000	Monografi
9	Kanwil Riau	6.000.000	6.000.000	Monografi
10	Kanwil Jambi	3.000.000	2.993.000	Monografi
11	Kanwil Sumatera Selatan	15.000.000	15.000.000	Monografi
12	Kanwil Lampung	3.000.000	2.945.575	Monografi
13	Kanwil Kalimantan Selatan	11.000.000	10.988.100	Monografi
14	Kanwil Bali	20.000.000	20.000.000	Monografi
15	Kanwil Nusa Tenggara Barat	9.000.000	8.982.000	Monografi
16	Kanwil Nusa Tenggara Timur	13.000.000	13.000.000	Monografi
17	Kanwil Bengkulu	5.000.000	5.000.000	Monografi
18	Kanwil Bangka Belitung	7.500.000	7.500.000	Monografi
19	Kanwil Papua Barat	10.000.000	10.000.000	Monografi
20	Kanwil Kepulauan Riau	12.000.000	11.831.000	Monografi
21	Kanwil Sulawesi Barat	3.000.000	3.000.000	Monografi
Jumlah Total		230.283.000	229.754.165	

Realisasi belanja modal lainnya periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 30,96% dibandingkan 31 Desember 2021 hal ini disebabkan karena bertambahnya kantor wilayah yang mengalokasikan anggaran belanja modal lainnya pada tahun 2022 sehingga alokasi anggaran belanja modal lainnya tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2022	TA. 2021	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	229.754.165	175.445.057	30,96
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	229.754.165	175.445.057	30,96
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	229.754.165	175.445.057	30,96

Realisasi belanja modal lainnya akan mempengaruhi penambahan aset tetap lainnya pada Neraca sehingga akan mempengaruhi kenaikan/penurunan pada Neraca.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak terdapat anggaran belanja bantuan sosial dikarenakan bukan entitas yang bertugas memberikan bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.515.900 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat Bendahara Penerimaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan satuan kerja di wilayah.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Kas lainnya dan Setara Kas pada DIPA Badan pembinaan Hukum Nasional.

Piutang PNBK Rp0

C.4 Piutang PNBK

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

<i>Bagian Tagihan Rp0</i>	<i>Lancar TP/TGR</i>	<p>C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> <p>Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.</p> <p>Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.</p>
<i>BagianLancar Rp0</i>	<i>TPA</i>	<p>C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran</p> <p>Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.</p>
<i>Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0</i>		<p>C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar</p> <p>Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.</p> <p>Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.</p>
<i>Belanja Dibayar di Muka Rp0</i>		<p>C.8 Beban Dibayar di Muka</p> <p>Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.</p>
<i>Pendapatan Masih Diterima Rp0</i>	<i>yang Harus</i>	<p>C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima</p> <p>Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan</p>

Rp4.165.000, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Pada 31 Desember 2022 saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebesar Rp0 karena telah dilakukan penyetoran pembayaran sewa kantin BPHN untuk untuk periode 1 Juni - 30 September 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022.

Persediaan
Rp98.063.299

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp98.063.299 dan Rp214.599.942. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan
31 Desember 2022 dan 2021

Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Barang Konsumsi	98.063.299	214.599.942
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	98.063.299	214.599.942

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-01 tanggal 2 Januari 2023.

Tagihan TP/TGR
Rp0.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang

melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Non Lancar
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp356.165.357.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	356,165,357,000
Mutasi tambah:		
Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi	Rp	-
Koreksi kesalahan input IP	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	356,165,357,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	356,165,357,000

Tanah seluas 11.348 m² terletak di Jl Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp24.758.430.869 dan Rp22.425.453.956. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp 22.425.453.956
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 2.333.786.913
Transfer Masuk	Rp -
Perolehan Hasil tindak Lanjut Normalisasi	Rp -
Koreksi	
Mutasi kurang:	Rp -
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp (810.000)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp 24.758.430.869
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp (19.957.797.804)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp 4.800.633.065

Mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.333.786.913 berasal dari transaksi pembelian belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian sebesar Rp2.333.786.913 dengan rincian sebagai berikut :

- 2 Buah Meja Kerja Kantor BPHN sebesar Rp19.525.000 (termasuk pajak sebesar Rp1.775.000);
- 10 AC Split Daikin berikut biaya dan alat kelengkapan pemasangannya sebesar Rp96.944.100 (termasuk pajak sebesar Rp8.813.100);
- 20 Unit Komputer Meja Asus All In One E5402WHAT-BA5812W sebesar Rp340.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp30.909.091);
- 7 Unit Komputer Jinjing berupa 1 Dell Precision 3560-002 dan 6 Asus NOTEBOOK B5302CEA_KG7110X sebesar 173.990.000 (termasuk pajak sebesar Rp15.817.273);
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Kantor BPHN berupa 3 unit Toyota Rush 1,5 S A/T GR Sport sebesar Rp856.800.000 (sudah termasuk pajak);
- 2 Unit Sice sebesar Rp17.982.000 (sudah termasuk pajak).
- 3 Unit Lemari Es Samsung Kulkas 2 Pintu (203L) RT19M300BGS/SE- Silver sebesar Rp11.045.600 (sudah termasuk pajak);

- 10 Unit Printer Epson L3210 Ecotank sebesar Rp32.000.000 (termasuk pajak sebesar Rp3.171.172);
- 5 Unit Water Dispenser Polytron Galon Bawah PWC776 Black Gloss sebesar Rp15.684.300 (sudah termasuk pajak);
- 1 unit kulkas 2 pintu Belleza Jumbo PRW 23MNX sebesar Rp3.350.000 (sudah termasuk pajak);
- 5 unit LCD Proyektor Loka Projector X38 sebesar Rp30.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 15 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp176.925.000 (sudah termasuk pajak);
- 18 Pcs Acer Travelmate P214 CORE-I5 sebesar Rp212.310.000 (sudah termasuk pajak);
- 12 set Peralatan Podcast sebesar Rp151.869.218 (sudah termasuk pajak);
- 2 unit komputer jinjing Macbook sebesar Rp49.498.000 (sudah termasuk pajak);
- 2 unit Scanner Fujitsu Scansnap Scanner Fi-800R PA03795-B001 sebesar Rp34.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 2 unit Televisi Aqua Android SMART TV - LE50AQT6600UG sebesar Rp14.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 1 unit Kamera PTZ MINRAY UV510A-T20-ST-IR sebesar Rp19.000.000 (sudah termasuk pajak);
- 2 unit alat citotec cervijet (alat kedokteran gigi klinik pratama BPHN) sebesar Rp12.200.000 (sudah termasuk pajak);
- 1 Tripod Libec 650EX Professional For Camcorder-DSLR-Libec 650 EX sebesar Rp3.197.658 (sudah termasuk pajak);
- Perangkat Ligting berupa 2 Godox VL300 LED Video Light/Godox VL300 dan 1 Godox SZ150R Zoom RGB LED Video Light sebesar Rp25.717.026 (sudah termasuk pajak);
- 1 Unit Gimbal Stabilizer Zhiyun Weebill 2 Pro+ Gimbal Zhiyuntech Weebill 2 Pro Plus sebesar Rp18.428.051 (sudah termasuk pajak);
- 1 set Alat-alat Kedokteran Klinik Pratama BPHN sebesar Rp7.920.960 (sudah termasuk pajak);

- 1 Unit Kursi Polaris 5Z, 2 Unit Kursi Tunggu Washington 4 Seat dan 1 Unit Kursi Tunggu Washington 3 seat sebesar Rp11.400.000 (sudah termasuk pajak).

Mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp810.000 adalah berupa Koreksi pencatatan nilai berkurang sebagai akibat adanya koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 yang salah input transaksi 190 seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan kesalahan pengisian tahun perolehan pada saat proses Normalisasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.

Gedung dan Bangunan
Rp59.683.830.714

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp59.683.830.714 dan Rp59.485.084.562. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	59,485,084,562
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	198,746,152
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 31 Desember 2022	59,683,830,714
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(19,501,797,176)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	40,182,033,538

Mutasi tambah Gedung dan bangunan terdapat pada Kantor Badan pembinaan Hukum Nasional berupa pengembangan nilai aset melalui belanja modal sebesar Rp198.746.152 adalah perbaikan Ruang Lantai Dua Gedung Annex Kantor BPHN.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp1.088.776.559

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.088.776.559 dan Rp1.041.978.369. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	1.041.978.369
Mutasi tambah:	
Pembelian	229.754.165
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	(182.955.975)
Saldo per 31 Desember 2022	1.088.776.559
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	1.088.776.559

Mutasi tambah:

- Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2022 bertambah sebesar Rp229.754.165 berupa pembelian buku perpustakaan (monografi) pada Kantor Wilayah sebesar Rp182.955.975 dan kantor BPHN sebesar Rp46.798.190.

Mutasi Kurang:

- Transfer keluar sebesar Rp182.955.975 berupa buku perpustakaan di Kantor Wilayah dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi.

Rincian Aset Tetap Lainnya

Periode 31 Desember 2022

No	Nama Satker	Nilai
1	BPHN	1.088.776.559
Jumlah		1.088.776.559

Rincian pembelian buku perpustakaan (monografi)

Periode 31 Desember 2022

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
1	BPHN	46.798.190	Monografi sebesar Rp38.548.190
			Buku UDC (Universal Decimal Classification) sebesar Rp8.250.000
2	Kanwil DKI Jakarta	3.993.500	Monografi
3	Kanwil Jawa Barat	7.249.800	Monografi
4	Kanwil Jawa Tengah	19.975.000	Monografi
5	Kanwil Yogyakarta	12.999.000	Monografi
6	Kanwil Jawa Timur	994.000	Monografi
7	Kanwil Sumatera Utara	18.030.000	Monografi
8	Kanwil Sumatera Barat	2.475.000	Monografi
9	Kanwil Riau	6.000.000	Monografi
10	Kanwil Jambi	2.993.000	Monografi
11	Kanwil Sumatera Selatan	15.000.000	Monografi
12	Kanwil Lampung	2.945.575	Monografi
13	Kanwil Kalimantan Selatan	10.988.100	Monografi
14	Kanwil Bali	20.000.000	Monografi
15	Kanwil Nusa Tenggara Barat	8.982.000	Monografi
16	Kanwil Nusa Tenggara Timur	13.000.000	Monografi
17	Kanwil Bengkulu	5.000.000	Monografi
18	Kanwil Bangka Belitung	7.500.000	Monografi
19	Kanwil Kepulauan Riau	11.831.000	Monografi
20	Kanwil Papua Barat	10.000.000	Monografi
21	Kanwil Sulawesi Barat	3.000.000	Monografi
Jumlah Total		229.754.165	-

Rincian Transfer Keluar
Periode 31 Desember 2022

NO	Satker	Jenis Barang	Jumlah
1	Kanwil DKI Jakarta	Monografi	3.993.500
2	Kanwil Jawa Barat	Monografi	7.249.800
3	Kanwil Jawa Tengah	Monografi	19.975.000
4	Kanwil Yogyakarta	Monografi	12.999.000
5	Kanwil Jawa Timur	Monografi	994.000
6	Kanwil Sumatera Utara	Monografi	18.030.000
7	Kanwil Sumatera Barat	Monografi	2.475.000
8	Kanwil Riau	Monografi	6.000.000
9	Kanwil Jambi	Monografi	2.993.000
10	Kanwil Sumatera Selatan	Monografi	15.000.000
11	Kanwil Lampung	Monografi	2.945.575
12	Kanwil Kalimantan Selatan	Monografi	10.988.100
13	Kanwil Bali	Monografi	20.000.000
14	Kanwil Nusa Tenggara Barat	Monografi	8.982.000
15	Kanwil Nusa Tenggara Timur	Monografi	13.000.000
16	Kanwil Bengkulu	Monografi	5.000.000
17	Kanwil Bangka Belitung	Monografi	7.500.000
18	Kanwil Kepulauan Riau	Monografi	11.831.000
19	Kanwil Papua Barat	Monografi	10.000.000
20	Kanwil Sulawesi Barat	Monografi	3.000.000
Jumlah Total			182.955.975

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2022.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp41.440.019.747)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp41.440.019.747) dan (Rp35.538.489.374).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.758.430.869	19.957.797.804	4.800.633.065
2	Gedung dan Bangunan	59.683.830.714	21.482.221.943	38.201.608.771
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	1.088.776.559	-	1.088.776.559
Akumulasi Penyusutan		85.531.038.142	41.440.019.747	44.091.018.395

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tetap yang
belum Diregister Rp0

C.21 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud
Rp4.184.325.500

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.184.325.500 dan Rp4.184.325.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.184.325.500
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi	-
Saldo per 31 Desember 2022	4.184.325.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	(4.184.325.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud periode 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25,300,000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382,297,500
- Website BPHN	2,058,528,000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1,483,830,000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19,140,000
- Aplikasi JDIHN	215,230,000
Aset tak berwujud lainnya	0
Jumlah	4,184,325,500

Aset Lain-lain
Rp853.242.316

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp853.242.316 dan Rp2.070.732.320. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	2.070.732.320
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penghapusan BMN yang dihentikan	(1.217.490.004)
- Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 30 Desember 2022	853.242.316
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(853.242.316)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi kurang sebesar Rp1.217.490.004 adalah berupa penghapusan BMN karena penjualan, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-10.PB.05.05 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan karena penjualan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini).

Rincian Aset Lain-lain terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan tersaji dalam tabel berikut :

Rincian Aset Lain-Lain

Periode 31 Desember 2022

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3.01.03.05.005	Sumersible Pump	Unit	1	229.812.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	1	9.395.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	50	565.570.316
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	8	48.465.000
TOTAL			60	853.242.316

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Lainnya
(Rp5.037.567.816)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp5.037.567.816) dan (Rp6.252.257.820). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Jumlah	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Lain-lain	853.242.316	(853.242.316)	0
Jumlah	5.037.567.816	(5.037.567.816)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.515.900. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN terdapat pada Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp107.413.285

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp107.413.285 dan Rp86.052.552. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2022. Rincian pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 tersaji sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2021 dengan nomor ID 547100163555	51.704.129	Dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303000256
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2021 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079	33.185.255	Dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303000248
3	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2021	1.163.168	Dibayarkan pada tanggal 08 Februari 2022 sesuai SP2D Nomor 221391303001170
Jumlah Total		86.052.552	

Utang Pihak Ketiga periode 31 Desember 2022 terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp107.413.285 berupa tagihan listrik dan telepon Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada bulan Januari 2023. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga tersaji sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Periode 31 Desember 2022

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	39.189.068	Tagihan Listrik Kantor BPHN I periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
		67.159.197	Tagihan Listrik Kantor BPHN II periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
		1.065.020	Tagihan Telepon Kantor BPHN periode Desember 2022 yang baru diterima tagihannya pada Januari 2023
Jumlah		107.413.285	

Utang pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan karena pemakaian listrik dan telpon tahun 2022 lebih besar. Meningkatnya pemakaian listrik dan telpon tahun 2022 dikarenakan pegawai sudah full Work From Office (WFO) mulai bulai Mei 2022.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang belum Ditagihkan terdapat pada kantor wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp9.358.395*

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.358.395 dan Rp21.870.535. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pada periode 31 Desember 2022 nilai pendapatan diterima dimuka sebesar Rp9.5358.395 adalah pendapatan atas sewa kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000 dan sudah diakui sebagai pendapatan untuk waktu 15 Bulan (Oktober s.d Desember 2021 serta Januari s.d Desember 2022) sebesar Rp15.631.605.

*Utang Jangka
pendek lainnya Rp0*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Ekuitas
Rp400.237.667.014

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp12.512.140

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.512.140 dan Rp13.068.323. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Jumlah Pendapatan 31 desember 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya	12.512.140	13.068.323	(4,26)

Rincian Pendapatan periode 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2022
Pendapatan PNB Lainnya	
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12.512.140
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	-
Jumlah	12.512.140

Pendapatan LO sebesar Rp12.512.140 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN selama 12 Bulan (1 Januari s.d 31 Desember 2022) yang berasal dari Pendapatan sewa kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000.

Beban Pegawai
Rp16.897.721.259

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.897.721.259 dan Rp17.008.065.691. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 2021

JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	16.897.721.259	17.008.065.691	(0,65)

Rincian Beban Pegawai Periode 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022
Beban Gaji Pokok PNS	11.016.042.260
Beban Pembulatan Gaji PNS	173.563
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	722.330.890
Beban Tunj Anak PNS	198.491.572
Beban Tunj. Struktural PNS	666.630.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.383.689.000
Beban Tunj. PPh PNS	86.033.294
Beban Tunj. Beras PNS	579.649.680
Beban Uang Makan PNS	1.785.186.000
Beban Tunjangan Umum PNS	200.645.000
Beban Uang Lembur	258.850.000
Jumlah	16.897.721.259

Beban Persediaan
Rp618.639.650

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp618.639.650 dan Rp532.836.893. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp618.639.650. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
Periode 31 Desember 2022*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	NAMA SATKER	TH 2022
1	Beban Persediaan Konsumsi	BPHN	618.639.650
Jumlah Beban Persediaan			618.639.650

*Perbandingan Jumlah Beban Persediaan
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	618.639.650	532.836.893	16,10
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	618.639.650	532.836.893	16,10

Beban Barang dan
Jasa
Rp49.519.821.979

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.519.821.979 dan Rp62.713.158.811. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Barang dan Jasa	49.519.821.979	62.713.158.811	(21,04)

Rincian Beban Barang dan Jasa

Periode 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2022
Beban Keperluan Perkantoran	3.229.591.875
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	5.042.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	200.640.000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	210.201.381
Beban Bahan	4.493.544.337
Beban Honor Output Kegiatan	605.472.500
Beban Barang Non Operasional Lainnya	36.909.013.700
Beban Barang Non Operasional Lainnya- Penanganan Pandemi COVID-19	39.737.900
Beban Langganan Listrik	1.114.944.297
Beban Langganan Telepon	13.502.300
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	399.600.000
Beban Sewa	1.167.210.000
Beban Jasa Profesi	786.922.500
Beban Jasa Lainnya	50.227.927
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	294.171.262
Jumlah	49.519.821.979

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat beban Barang dan Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	Jumlah
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	210.201.381
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.737.900
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	294.171.262
Jumlah	544.110.543

Beban Pemeliharaan
Rp3.354.965.899

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.354.965.899 dan Rp2.710.578.417. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Pemeliharaan
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan	3.354.965.899	2.710.578.017	23,77

*Rincian Beban Pemeliharaan
Periode 31 Desember 2022*

URAIAN	TH 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.857.508.466
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.379.620.333
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	117.837.100
Jumlah	3.354.965.899

Beban Pemeliharaan periode 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 23,77 persen bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021. Hal ini antara lain disebabkan karena:

1. Adanya peningkatan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 berupa:
 - Belanja Pemeliharaan/Peningkatan fungsi sarana lingkungan gedung kantor BPHN (jalan, taman, dll) sebesar Rp95.887.000;
 - Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp1.761.621.466.
2. Adanya peningkatan Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 berupa:

- Pemakaian habis pakai bahan persediaan untuk pemeliharaan selama periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.837.100;

Beban Perjalanan Dinas
Rp14.636.050.265

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.636.050.265 dan Rp16.727.471.243. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jumlah Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2022 dan 2021*

JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	14.636.050.265	16.727.471.243	(12,50)

*Rincian Beban Perjalanan Dinas
Periode 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	10.593.701.405
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.622.582.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	818.568.006
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.601.198.854
Jumlah	14.636.050.265

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan Badan Pembinaan Hukum Nasional bukan merupakan instansi pengelola ataupun penyalur Bantuan Sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp5.855.601.849

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.855.601.849 dan Rp5.538.950.831. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.855.601.849	5.538.950.831	5,72

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.891.952.316
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.960.849.533
Jumlah Penyusutan	5.852.801.849
Beban Amortisasi Software	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-
Jumlah Amortisasi	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.800.000
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-
Jumlah	5.855.601.849

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp67.251.520

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2022 dan 2021*

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	67.251.520	45.071.007	49,21

*Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
Periode 31 Desember 2022*

URAIAN	TH 2022
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	50.001.111
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	17.250.409
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	10.343.009
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6.907.400
- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	67.251.520

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional periode 31 Desember 2022 sebesar Rp 67.251.520 terdiri dari :

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar sebesar Rp50.011.111 yang terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja berupa Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 yang merupakan hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022.
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp6.907.400 berupa :
 - Pengembalian kelebihan bayar perawatan AC Split TA. 2021 sebesar Rp3.600.000 sesuai NTPN nomor ODCA561QUH4DFDCE tanggal 11 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp1.200.000 berupa pengembalian transport lokal dan pemantauan a.n. Augusto Prawar sesuai NTPN nomor 266702G4V6RFS4C8 tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp35.800 kegiatan fasilitasi penyusunan NA sesuai NTPN nomor EE70B8N3E0S6NA2B tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp71.600 kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu sesuai NTPN nomor FDB211JNFC93FANV tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu pada Kantor Wilayah Aceh sebesar

Rp2.000.000 berupa pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu atas duplikasi belanja pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh sesuai NTPN B0EEB0N9VIEB6SHC tanggal 25 November 2022;

3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp10.343.009 berupa :

- Pengembalian Kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reinal Saputra sebesar Rp2.255.600 sesuai NTPN 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp9 berupa Pembulatan Gaji melalui potongan SPM 00006T/409288/2022 tanggal 21 Januari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp8.087.400 berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022;

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017*

Pos-Pos Luar Biasa

D.12 POS-POS LUAR BIASA

Rp0

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa baik untuk 31 Desember 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp403.693.026.368

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp403.693.026.368 dan Rp406.657.852.575.

Defisit LO
(Rp90.803.037.241)

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah defisit sebesar (Rp90.803.037.241) dan (Rp105.172.922.556). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi

kurang atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp49.538.524)

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp49.538.524) dan (Rp3.661.320). Koreksi ini terdapat pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Koreksi yang terjadi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja disebabkan karena adanya :

- Adanya koreksi SPM dikarenakan kesalahan penggunaan akun atas Pembayaran Belanja Barang Sesuai kontrak no PHN.1.PB.02.01-25/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan BAST no PHN.1.PB.02.01-49 tanggal 23 Maret 2022 dan BAP no PHN.1.PB.02.01.53 tanggal 24 Maret 2022 perihal perbaikan ruangan lantai dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022, yang semula menggunakan akun 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) menjadi 533121 (belanja penambahan nilai gedung dan bangunan). Pada modul aset, koreksi tersebut dicatat pada menu RUH - Pencatatan transaksi BMN – Perubahan - Koreksi Perubahan Nilai Bertambah yang menghasilkan susut transaksional sebesar Rp48.383.524.
- Koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 dikarenakan terjadi salah input transaksi 190, seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan kesalahan input tanggal perolehan pada saat proses Normalisasi, sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK. Koreksi tersebut menghasilkan Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.155.000. Rincian Koreksi

Aset Tetap Non Revaluasi periode 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Periode 31 Desember 2022

No	Tanggal	Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi	Keterangan
1	14-09-2011	Koreksi pencatatan Nilai bertambah	48.383.524	Susut transaksional atas koreksi kesalahan akun belanja gedung dan bangunan menggunakan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
2	31-12-2022	Koreksi pencatatan	1.155.000	Koreksi atas tindak lanjut normalisasi rak kayu tahun 2021
Jumlah			49.538.524	

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain 31 Desember 2022

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar Entitas
Rp87.397.216.411*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp87.397.216.411 dan Rp102.211.757.669. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Periode 31 Desember 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(71.416.520)
Ditagihkan ke Entitas Lain	87.651.588.906
Transfer Keluar	(182.955.975)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	87.397.216.411

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp71.416.520) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp68.109.120 berupa :

- Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran sewa kantin BPHN untuk Bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN nomor CAE501JNFC5QV9EF tanggal 21 Februari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pengembalian kelebihan pembayaran perawatan AC Split Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.600.000 sesuai dengan NTPN nomor ODCA561QUH4DFDGE tanggal 11 Maret 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa Pengembalian kelebihan bayar gaji induk pegawai BPHN Bulan November 2021 A.n Reinal Saputra sebesar Rp2.255.600 sesuai NTPN nomor 04BF67QLU63B85RS tanggal 13 Januari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berupa pembulatan gaji sebesar Rp9 melalui potongan SPM nomor 00006T/409288/2022 tanggal 21 Januari 2022;
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran

Yang Lalu sebesar Rp8.087.400 berupa Pengembalian Tunjangan Suami dan Beras Suami Bulan Agustus 2019 s.d Februari 2021 a.n Pegawai Gustina sesuai NTPN Nomor 157F37QLU70R64TU tanggal 03 November 2022;

- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp50.001.111 berupa hasil lelang Barang Bergerak berupa 1 Paket Inventaris Kantor yang terdiri dari: Papan Visual/Papan Nama, Movitex Board, LCD Projector/Infocus, Kursi besi metal, Sice, Meja Komputer, AC, Televisi, Lambang Garuda, Gambar Presiden, Tiang Bendera, Mimbar/Podium, Handy Talky, Mirror Surgical Set (alat kedokteran umum), Metal Chatheeter, Neirbeken Stainless Steel, PC, Laptop, Printer (Peralatan Personal Komputer), Scanner (Peralatan Personal Komputer) dan Battery Charger sesuai Risalah Lelang Nomor 393/28/2022 Tanggal 05 Oktober 2022 dan NTPN Nomor BE9AB3CIF221JE1V tanggal 07 Oktober 2022.
2. Pada Kantor Wilayah Papua sebesar Rp1.307.400 berupa;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp1.200.000 berupa pengembalian transport lokal dan pemantauan a.n. Augusto Prawar sesuai NTPN nomor 266702G4V6RFS4C8 tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp35.800 kegiatan fasilitasi penyusunan NA sesuai NTPN nomor EE70B8N3E0S6NA2B tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada Kanwil Papua sebesar Rp71.600 kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu sesuai NTPN nomor FDB211JNFC93FANV tanggal 30 Maret 2022.
3. Pada Kantor Wilayah Aceh sebesar Rp2.000.000 berupa pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu atas duplikasi belanja pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh sesuai NTPN B0EEB0N9VIEB6SHC tanggal 25 November 2022;

Sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp87.651.588.906 berupa transaksi realisasi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah.

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Periode 31 Desember 2022

Akun	Uraian	Transaksi belanja
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 16.872.026.404
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp (233.155.145)
5122	Belanja Lembur	Rp 258.850.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 3.645.475.256
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 42.163.011.537
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	Rp (117.043.100)
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 583.180.152
5218	Pengembalian Belanja Persediaan	Rp -
5221	Belanja Jasa	Rp 3.807.345.053
5221	Pengembalian Belanja Jasa	Rp (327.500)
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 3.273.888.754
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 14.658.684.864
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp (22.634.599)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.333.786.913
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 198.746.152
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 229.754.165
Jumlah Total		Rp 87.651.588.906

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Tidak terdapat transfer Masuk pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp182.955.975 berupa buku hukum (monografi) dari Divisi Pelayanan Hukum (DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional) kepada Divisi Administrasi (DIPA Sekretariat Jenderal) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Transfer Keluar
Periode 31 Desember 2022

NO	Satker	Jenis Barang	Jumlah
1	Kanwil DKI Jakarta	Monografi	3.993.500
2	Kanwil Jawa Barat	Monografi	7.249.800
3	Kanwil Jawa Tengah	Monografi	19.975.000
4	Kanwil Yogyakarta	Monografi	12.999.000
5	Kanwil Jawa Timur	Monografi	994.000
6	Kanwil Sumatera Utara	Monografi	18.030.000
7	Kanwil Sumatera Barat	Monografi	2.475.000
8	Kanwil Riau	Monografi	6.000.000
9	Kanwil Jambi	Monografi	2.993.000
10	Kanwil Sumatera Selatan	Monografi	15.000.000
11	Kanwil Lampung	Monografi	2.945.575
12	Kanwil Kalimantan Selatan	Monografi	10.988.100
13	Kanwil Bali	Monografi	20.000.000
14	Kanwil Nusa Tenggara Barat	Monografi	8.982.000
15	Kanwil Nusa Tenggara Timur	Monografi	13.000.000
16	Kanwil Bengkulu	Monografi	5.000.000
17	Kanwil Bangka Belitung	Monografi	7.500.000
18	Kanwil Kepulauan Riau	Monografi	11.831.000
19	Kanwil Papua Barat	Monografi	10.000.000
20	Kanwil Sulawesi Barat	Monografi	3.000.000
Jumlah Total			182.955.975

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Hibah langsung pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ekuitas *Akhir*
Rp400.237.667.014

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 telah dilakukan jurnal balik atas jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2021 sebesar Rp21.870.535 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 17 Januari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp51.704.129 sesuai SP2D nomor 221391303000256 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada tanggal 17 Januari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp33.185.255 sesuai SP2D nomor 221391303000248 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
4. Pada tanggal 08 Februari 2022 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp1.163.168 sesuai SP2D nomor 221391303001170 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
5. Pada tanggal 21 Februari 2022 telah dilakukan pembayaran sewa kantin BPHN untuk bulan Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 2021 sebesar Rp4.165.000 sesuai NTPN CAE501JNFC5QV9EF (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);

6. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan jurnal koreksi reklas beban atas ketidaktepatan penggunaan akun persediaan yang dikarenakan kesalahan pemilihan kodefikasi barang persediaan pada modul komitmen sebesar Rp19.807.900;
7. Terdapat Utang kepada pihak ketiga terkait Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 107.413.285 yang terdiri dari Tagihan Listrik Kantor BPHN Bulan Desember 2022 Rp39.189.068 dengan no ID 547100717100 dan 547102931079, Tagihan Listrik Bulan Desember 2022 Rp67.159.197 dengan no ID 547100163555 dan Tagihan Telepon Kantor BPHN Bulan Desember 2022 Rp1.065.020 yang sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 30 Desember 2022;
8. Pada Kantor Badan pembinaan Hukum Nasional telah dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka diakhir Desember 2022 atas Sewa Kantin BPHN Tahun 2021 yang bernilai Rp24.990.000 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp9.358.395 (memo penyesuaian terlampir);
9. Pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara terhadap sisa kas up sesuai NTPN 2B35E7QLU631M6J8 tanggal 07 Januari 2022;
10. Pada Kantor Wilayah Sumatera Selatan telah dilakukan jurnal koreksi atas koreksi kode barang buku lainnya ke monografi melalui menu perolehan lainnya pada modul aset tetap sehingga muncul pendapatan perolehan aset lainnya pada Neraca percobaan, pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan yang diterima entitas melainkan dampak dari koreksi kode barang pada modul aset tetap sehingga perlu

dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya pada modul GLP sebesar Rp14.905.000 (memo penyesuaian terlampir);

11. Pada Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Selatan telah dilakukan jurnal koreksi atas koreksi kode barang buku lainnya ke monografi melalui menu perolehan lainnya pada modul aset tetap sehingga muncul pendapatan perolehan aset lainnya pada Neraca percobaan, pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan yang diterima entitas melainkan dampak dari koreksi kode barang pada modul aset tetap sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya pada modul GLP sebesar Rp13.000.000 (memo penyesuaian terlampir);
12. Pada Kantor Wilayah Bali telah dilakukan jurnal koreksi atas koreksi kode barang buku lainnya ke monografi melalui menu perolehan lainnya pada modul aset tetap sehingga muncul pendapatan perolehan aset lainnya pada Neraca percobaan, pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan yang diterima entitas melainkan dampak dari koreksi kode barang pada modul aset tetap sehingga perlu dilakukan jurnal koreksi atas pendapatan perolehan lainnya pada modul GLP sebesar Rp5.600.000 (memo penyesuaian terlampir);
13. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional telah dilakukan jurnal koreksi atas belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada modul GLP sebesar Rp198.746.152. Jurnal Koreksi tersebut dilakukan sebagai akibat adanya koreksi SPM karena kesalahan penggunaan akun atas Pembayaran Belanja Barang Sesuai kontrak no PHN.1.PB.02.01-25/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan BAST no PHN.1.PB.02.01-49 tanggal 23 Maret 2022 dan BAP no PHN.1.PB.02.01.53 tanggal 24 Maret 2022 perihal perbaikan ruangan lantai dua Gedung Annex Kantor BPHN TA 2022, yang semula menggunakan akun 523111 (belanja pemeliharaan gedung dan bangunan) menjadi 533121

(belanja penambahan nilai gedung dan bangunan) sebesar Rp198.746.152. Jurnal koreksi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional sebesar Rp198.746.152 karena transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang semula membentuk Beban Pemeliharaan telah berubah menjadi transaksi belanja penambahan nilai gedung dan bangunan sehingga telah menambah nilai aset gedung dan bangunan sebagaimana tercatat dalam Neraca.

14. Terdapat belanja modal pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan 19 Kantor Wilayah sebesar Rp 2.762.287.230, belanja modal tersebut berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp2.333.786.913, belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp198.746.152 dan belanja modal lainnya sebesar Rp229.754.165. Belanja modal yang terealisasi mempengaruhi penambahan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya pada Neraca sebesar Rp2.578.521.255. Dengan demikian terdapat selisih antara belanja modal dalam LRA dengan kenaikan jumlah aset pada neraca sebesar Rp183.765.975 yang disebabkan karena adanya :

- a. Koreksi berkurang peralatan dan mesin sebesar Rp810.000 disebabkan karena adanya koreksi pencatatan pada aset tetap berupa rak kayu NUP 153 yang salah input nilai transaksi, seharusnya Rp1.115.000, tercatat Rp1.925.000 dan kesalahan pengisian tahun perolehan pada saat proses Normalisasi. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2022, sebagai tindak lanjut atas temuan BPK.
- b. Pengurangan aset tetap lainnya terkait Transfer Keluar pada 19 Kantor Wilayah berupa Monografi dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi sebesar Rp182.955.975;

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN

1. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas kesalahan pencatatan dalam proses normalisasi ketika input transaksi kode 190 tercatat senilai Rp1.925.000 seharusnya Rp1.115.000 sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp810.000 dan kesalahan penginputan pengisian tahun perolehan yang tercatat pada 02 februari 2020 seharusnya 02 Februari 1920. Atas temuan tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan atas nilai dan tahun perolehan rak kayu pada modul aset sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor PHN.1-PB.04.01-01 tanggal 30 Desember 2023
2. Pada Kantor Wilayah Papua terdapat temuan pemeriksaan atas audit Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021. Temuan tersebut berupa kelebihan pembayaran atas realisasi belanja barang tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.307.400. Temuan kelebihan pembayaran tersebut telah ditindak lanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara dan dinyatakan telah selesai. Berikut rincian penyetoran ke kas negara :
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terkait transport lokal koordinasi lokal dan pemantauan a.n Augusto Prawar sebesar Rp1.200.000 sesuai NTPN 266702G4V6RFS4C8 tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) terkait kegiatan fasilitasi penyusunan naskah akademik nomor SPM 00012T/408909/2021 sebesar Rp35.800 sesuai NTPN EE70B8N3E0S6NA2B tanggal 30 Maret 2022;
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu nomor SPM 00013T/408909/2021 sebesar Rp71.600 sesuai

NTPN FDB211JNFC93FANV tanggal 30 Maret 2022.

3. Pada Kantor Wilayah Aceh terdapat temuan atas audit tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi manusia atas pemberian bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Tahun Anggaran 2021-2022. Temuan tersebut berupa duplikasi pemberian dana Bantuan hukum litigasi sebesar Rp2.000.000 sesuai data realisasi Tahun Anggaran 2021 atas nama Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Banda Aceh. Temuan berupa duplikasi pemberian dana bantuan hukum litigasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas Negara berupa Penyetoran kembali Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp2.000.000 ke kas negara sesuai NTPN B0EEB0N9V1EB6SHC tanggal 25 november 2022;
4. Pada Kantor Wilayah Banten terdapat temuan atas Audit Tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi manusia atas pemberian bantuan hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Tahun Anggaran 2022. Temuan tersebut berupa duplikasi pembayaran Bantuan Hukum litigasi tahap persidangan sebesar Rp3.000.000 dilakukan oleh OBH Posbakumadin kabupaten Tangerang dan duplikasi pembayaran Bantuan Hukum tahap penyidikan sebesar Rp2.000.000 dilakukan oleh LBH SIKAP. Temuan berupa duplikasi pembayaran dana bantuan hukum telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pengembalian belanja bantuan hukum (521219) dari OBH Posbakumadin kabupaten Tangerang sebesar Rp3.000.000 sesuai NTPN EC4C31GAACMEEQR9 tanggal 19 Desember 2022;
 - Telah dilakukan pengembalian belanja bantuan hukum (521219) dari LBH SIKAP sebesar

Rp2.000.000 sesuai NTPN D6EA02CNQ78QRQ6C
tanggal 19 Desember 2022;

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
131111	Tanah	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869	(18,065,500,488)	(1,892,297,316)	0	(19,957,797,804)	4,800,633,065
3010302001	Elevator /Lift	1,490,098,000	(1,383,662,430)	(106,435,570)	0	(1,490,098,000)	0
3010303003	Stationary Compressor	3,210,000	(3,210,000)	0	0	(3,210,000)	0
3010304002	Portable Generating Set	4,042,500	(4,042,500)	0	0	(4,042,500)	0
3010304003	Stationary Generating Set	114,416,000	(114,416,000)	0	0	(114,416,000)	0
3010305002	Portable Water Pump	126,665,000	(126,665,000)	0	0	(126,665,000)	0
3010305003	Stationary Water Pump	129,748,000	(129,748,000)	0	0	(129,748,000)	0
3010305005	Sumersible Pump	237,675,000	(169,683,928)	(27,196,429)	0	(196,880,357)	40,794,643
3020101001	Sedan	1,552,243,950	(1,552,243,950)	0	0	(1,552,243,950)	0
3020101002	Jeep	849,150,000	(380,917,857)	(72,035,714)	0	(452,953,571)	396,196,429
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	374,922,000	(374,922,000)	0	0	(374,922,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2,525,021,500	(1,668,221,500)	(122,400,000)	0	(1,790,621,500)	734,400,000
3020104001	Sepeda Motor	186,979,500	(186,979,500)	0	0	(186,979,500)	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	231,137,500	(231,137,500)	0	0	(231,137,500)	0
3030103001	Battery Charge	1,921,700	(1,249,105)	(192,170)	0	(1,441,275)	480,425
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	1,320,000	(1,122,000)	(132,000)	0	(1,254,000)	66,000
3030205001	Tool Kit Set	5,506,969	(5,506,969)	0	0	(5,506,969)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	4,873,523	(4,873,523)	0	0	(4,873,523)	0
3030301064	Memori Programmer	2,417,972	(2,417,972)	0	0	(2,417,972)	0
3030308012	Termometer Standar	2,090,000	(2,090,000)	0	0	(2,090,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	9,546,000	(9,546,000)	0	0	(9,546,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	3,940,000	(3,940,000)	0	0	(3,940,000)	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	21,126,980	(21,126,980)	0	0	(21,126,980)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	234,200,000	(234,200,000)	0	0	(234,200,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	74,800,000	(74,800,000)	0	0	(74,800,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	161,964,500	(152,163,500)	(2,178,000)	0	(154,341,500)	7,623,000
3050104002	Lemari Kayu	114,759,000	(102,995,000)	(4,332,000)	0	(107,327,000)	7,432,000
3050104003	Rak Besi	334,819,890	(333,944,890)	(350,000)	0	(334,294,890)	525,000
3050104004	Rak Kayu	88,344,984	(87,275,992)	(634,597)	0	(87,910,589)	434,395
3050104005	Filing Cabinet Besi	292,050,721	(292,050,721)	0	0	(292,050,721)	0
3050104007	Brandkas	4,775,000	(4,775,000)	0	0	(4,775,000)	0
3050104011	Rotary Filing	4,467,000	(4,467,000)	0	0	(4,467,000)	0
3050104016	Roll Opek	10,906,000	(10,906,000)	0	0	(10,906,000)	0
3050104020	Lemari Display	8,000,000	(8,000,000)	0	0	(8,000,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	66,102,500	(66,102,500)	0	0	(66,102,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050105002	Hydrant	23,372,000	(23,372,000)	0	0	(23,372,000)	0
3050105003	Sprinkler	1,156,000	(1,156,000)	0	0	(1,156,000)	0
3050105004	Fire Alarm	3,615,000	(3,615,000)	0	0	(3,615,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	163,281,745	(108,297,145)	(12,218,800)	0	(120,515,945)	42,765,800
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	15,532,000	(15,532,000)	0	0	(15,532,000)	0
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	7,807,890	(7,807,890)	0	0	(7,807,890)	0
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	2,732,000	(2,732,000)	0	0	(2,732,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	106,706,000	(83,661,800)	(6,841,200)	0	(90,503,000)	16,203,000
3050105017	Mesin Absensi	138,762,000	(108,347,000)	(8,690,000)	0	(117,037,000)	21,725,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	11,528,000	(7,660,500)	(1,547,000)	0	(9,207,500)	2,320,500
3050105025	Headmachine Besar	2,690,000	(2,690,000)	0	0	(2,690,000)	0
3050105031	Panel Pameran	3,887,000	(3,887,000)	0	0	(3,887,000)	0
3050105037	White Board Electronic	4,278,000	(4,278,000)	0	0	(4,278,000)	0
3050105038	Laser Pointer	11,440,000	(11,440,000)	0	0	(11,440,000)	0
3050105039	Display	9,900,000	(9,900,000)	0	0	(9,900,000)	0
3050105045	Penangkal Petir	6,931,000	(6,931,000)	0	0	(6,931,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	123,209,500	(58,300,600)	(20,493,900)	0	(78,794,500)	44,415,000
3050105052	Alat Perakam Suara (Voice Pen)	43,300,000	(43,300,000)	0	0	(43,300,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	126,925,935	(126,925,935)	0	0	(126,925,935)	0
3050105062	Bel	24,475,000	(15,565,000)	(2,970,000)	0	(18,535,000)	5,940,000
3050105095	Wastafel Portable	9,996,250	(2,998,875)	(1,999,250)	0	(4,998,125)	4,998,125
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	1,242,000	(1,242,000)	0	0	(1,242,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2,156,234	(2,156,234)	0	0	(2,156,234)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	229,130,781	(192,604,220)	(7,794,056)	0	(200,398,276)	28,732,505
3050201003	Kursi Besi/Metal	307,580,000	(72,520,000)	(58,990,000)	0	(131,510,000)	176,070,000
3050201004	Kursi Kayu	3,372,000	(3,372,000)	0	0	(3,372,000)	0
3050201005	Sice	381,625,416	(277,185,800)	(29,823,082)	0	(307,008,882)	74,616,534
3050201008	Meja Rapat	322,609,000	(315,669,000)	(2,320,000)	0	(317,989,000)	4,620,000
3050201009	Meja Komputer	13,183,000	(13,183,000)	0	0	(13,183,000)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	2,866,234	(2,866,234)	0	0	(2,866,234)	0
3050201013	Meja Telepon	5,038,000	(5,038,000)	0	0	(5,038,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	23,064,000	(23,064,000)	0	0	(23,064,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	38,385,000	(21,585,000)	(5,525,000)	0	(27,110,000)	11,275,000
3050201017	Sketsel	9,007,000	(9,007,000)	0	0	(9,007,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	559,542,830	(479,315,630)	(27,441,600)	0	(506,757,230)	52,785,600
3050202003	Jam Elektronik	92,000	(92,000)	0	0	(92,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2,886,500	(2,886,500)	0	0	(2,886,500)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	9,372,500	(9,372,500)	0	0	(9,372,500)	0
3050203004	Mesin Cuci	2,970,000	(2,970,000)	0	0	(2,970,000)	0
3050203005	Air Cleaner	2,299,000	(459,800)	(459,800)	0	(919,600)	1,379,400
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	412,500	(412,500)	0	0	(412,500)	0
3050204001	Lemari Es	45,564,910	(28,939,040)	(2,076,781)	0	(31,015,821)	14,549,089
3050204003	A.C. Window	234,610,000	(234,610,000)	0	0	(234,610,000)	0
3050204004	A.C. Split	1,033,216,325	(284,790,874)	(206,643,265)	0	(491,434,139)	541,782,186
3050204006	Kipas Angin	1,254,000	(1,254,000)	0	0	(1,254,000)	0
3050205019	Mixer	6,462,500	(6,462,500)	0	0	(6,462,500)	0
3050206002	Televisi	99,345,000	(28,425,500)	(18,469,000)	0	(46,894,500)	52,450,500
3050206007	Loudspeaker	76,250,500	(33,874,750)	(10,867,500)	0	(44,742,250)	31,508,250
3050206008	Sound System	486,049,418	(169,480,200)	(51,786,924)	0	(221,267,124)	264,782,294
3050206012	Wireless	12,498,000	(12,498,000)	0	0	(12,498,000)	0
3050206014	Microphone	29,480,000	(13,798,400)	(3,484,800)	0	(17,283,200)	12,196,800
3050206015	Microphone Table Stand	2,013,000	(2,013,000)	0	0	(2,013,000)	0
3050206016	Mic Conference	84,150,000	(84,150,000)	0	0	(84,150,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	90,190,000	(90,190,000)	0	0	(90,190,000)	0
3050206020	Camera Video	99,327,860	(86,748,860)	(3,594,000)	0	(90,342,860)	8,985,000
3050206021	Tustel	3,076,250	(3,076,250)	0	0	(3,076,250)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	14,086,105	(8,728,232)	(1,530,821)	0	(10,259,053)	3,827,052
3050206036	Dispenser	60,098,534	(39,830,634)	(3,728,030)	0	(43,558,664)	16,539,870
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	70,398,500	(70,398,500)	0	0	(70,398,500)	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	666,232	(666,232)	0	0	(666,232)	0
3050206056	Karpet	59,605,000	(14,985,700)	(9,915,400)	0	(24,901,100)	34,703,900
3050206057	Vertikal Blind	72,705,184	(70,252,466)	(2,452,718)	0	(72,705,184)	0
3050206058	Gordyn/Kray	264,581,100	(229,249,100)	(8,833,000)	0	(238,082,100)	26,499,000
3050206059	Kabel Rol	7,700,000	(7,700,000)	0	0	(7,700,000)	0
3050206061	Keset Kaki	25,224,000	(25,224,000)	0	0	(25,224,000)	0
3050206068	DVD Player	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
3050206071	Kabel	2,029,500	(2,029,500)	0	0	(2,029,500)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	25,117,660	(18,586,840)	(2,094,520)	0	(20,681,360)	4,436,300
3060101002	Audio Mixing Portable	5,802,500	(580,250)	(1,160,500)	0	(1,740,750)	4,061,750

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM

Tanggal : 09/02/23 9:30 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3060101003	Audio Mixing Stationer	20,702,000	(2,070,200)	(4,140,400)	0	(6,210,600)	14,491,400
3060101017	Cassette Duplicator	34,824,000	(34,824,000)	0	0	(34,824,000)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	41,074,000	(10,037,500)	(6,897,000)	0	(16,934,500)	24,139,500
3060101039	Light Signal	3,500,000	(3,500,000)	0	0	(3,500,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	61,821,288	(57,861,288)	(1,650,000)	0	(59,511,288)	2,310,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2,381,500	(2,381,500)	0	0	(2,381,500)	0
3060101060	Power Amplifier	11,000,000	(11,000,000)	0	0	(11,000,000)	0
3060101079	Microphone Cable	1,870,000	(1,870,000)	0	0	(1,870,000)	0
3060101088	Voice Recorder	6,964,500	(6,964,500)	0	0	(6,964,500)	0
3060101091	Digital LED Running Text	23,499,300	(23,499,300)	0	0	(23,499,300)	0
3060102003	Camera Electronic	91,520,000	(91,520,000)	0	0	(91,520,000)	0
3060102012	Video Monitor	59,751,660	(59,751,660)	0	0	(59,751,660)	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable	8,448,000	(844,800)	(1,689,600)	0	(2,534,400)	5,913,600
3060102016	Video Switcher	21,940,260	(14,070,750)	(1,748,780)	0	(15,819,530)	6,120,730
3060102020	Video Test Signal Generator	12,287,000	(12,287,000)	0	0	(12,287,000)	0
3060102034	Teleprompter	19,140,000	(1,914,000)	(3,828,000)	0	(5,742,000)	13,398,000
3060102045	Tripod Camera	58,388,958	(33,877,610)	(5,179,906)	0	(39,057,516)	19,331,442
3060102055	Lighting Stand Tripod	71,606,700	(14,437,170)	(12,704,340)	0	(27,141,510)	44,465,190
3060102056	Film Projector	146,646,000	(146,646,000)	0	0	(146,646,000)	0
3060102057	Slide Projector	3,190,000	(3,190,000)	0	0	(3,190,000)	0
3060102060	Camera Film	116,688,000	(11,668,800)	(23,337,600)	0	(35,006,400)	81,681,600
3060102061	Lensa Kamera	108,303,600	(68,045,800)	(9,948,400)	0	(77,994,200)	30,309,400
3060102099	Automatic Emergency Light	1,100,000	(1,100,000)	0	0	(1,100,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	16,400,000	(16,400,000)	0	0	(16,400,000)	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	12,162,360	(12,162,360)	0	0	(12,162,360)	0
3060102118	Head Set	6,072,000	(607,200)	(1,214,400)	0	(1,821,600)	4,250,400
3060102128	Camera Digital	280,600,000	(167,044,000)	(24,692,000)	0	(191,736,000)	88,864,000
3060102129	Tas Kamera	2,400,200	(2,400,200)	0	0	(2,400,200)	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	8,231,500	(8,231,500)	0	0	(8,231,500)	0
3060102131	Lensa Filter	1,687,500	(1,687,500)	0	0	(1,687,500)	0
3060102135	LCD Monitor	1,204,207,689	(1,065,424,620)	(122,582,269)	0	(1,188,006,889)	16,200,800
3060102152	RF Cable	7,700,000	(770,000)	(1,540,000)	0	(2,310,000)	5,390,000
3060102165	Camera Conference	2,035,000	(203,500)	(407,000)	0	(610,500)	1,424,500
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	44,145,077	0	(4,414,508)	0	(4,414,508)	39,730,569
3060104045	Mesin Barcode	3,740,000	(3,740,000)	0	0	(3,740,000)	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	57,750,000	(5,775,000)	(11,550,000)	0	(17,325,000)	40,425,000
3060201001	Telephone (PABX)	241,354,500	(211,356,400)	(29,998,100)	0	(241,354,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3060201003	Pesawat Telephone	2,741,000	(2,741,000)	0	0	(2,741,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	48,210,000	(13,803,000)	(9,642,000)	0	(23,445,000)	24,765,000
3060201010	Facsimile	35,178,000	(35,178,000)	0	0	(35,178,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	72,597,920	(71,551,028)	(1,046,892)	0	(72,597,920)	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	9,800,000	(9,800,000)	0	0	(9,800,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	13,200,000	(13,200,000)	0	0	(13,200,000)	0
3060323022	Change Over Switch	15,923,160	(14,871,186)	(701,316)	0	(15,572,502)	350,658
3070101001	Sterilisator	9,900,000	(9,900,000)	0	0	(9,900,000)	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	12,866,234	(12,866,234)	0	0	(12,866,234)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	658,000	(658,000)	0	0	(658,000)	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	935,000	(935,000)	0	0	(935,000)	0
3070101022	Lemari Steril	4,565,000	(4,565,000)	0	0	(4,565,000)	0
3070101026	Tabung O2	3,088,635	(2,955,772)	(132,863)	0	(3,088,635)	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	12,155,075	(5,169,068)	(2,369,607)	0	(7,538,675)	4,616,400
3070101127	Kursi Dorong	2,791,250	(2,512,125)	(279,125)	0	(2,791,250)	0
3070102002	Dental Unit	123,200,000	(123,200,000)	0	0	(123,200,000)	0
3070102019	Portable Dental Unit	14,107,500	(2,821,500)	(2,821,500)	0	(5,643,000)	8,464,500
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	3,713,000	(3,713,000)	0	0	(3,713,000)	0
3070102118	Bein	671,293	(604,164)	(67,129)	0	(671,293)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	12,200,000	0	(1,220,000)	0	(1,220,000)	10,980,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2,811,234	(2,811,234)	0	0	(2,811,234)	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	3,436,000	(3,436,000)	0	0	(3,436,000)	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	89,347,170	(89,347,170)	0	0	(89,347,170)	0
3070118011	Data Catridge	24,657,600	(24,657,600)	0	0	(24,657,600)	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	8,980,519	(953,604)	(898,051)	0	(1,851,655)	7,128,864
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	26,125,000	(3,265,625)	(3,265,625)	0	(6,531,250)	19,593,750
3080804009	DC / AC Power Supply	2,195,000	(2,195,000)	0	0	(2,195,000)	0
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3100102001	P.C Unit	2,213,247,000	(1,547,506,750)	(225,173,500)	0	(1,772,680,250)	440,566,750
3100102002	Lap Top	1,087,528,498	(376,770,748)	(141,695,625)	0	(518,466,373)	569,062,125
3100102003	Note Book	309,832,000	(189,382,000)	(48,900,000)	0	(238,282,000)	71,550,000
3100102007	Net Book	1,567,210,000	(1,019,348,000)	(224,330,750)	0	(1,243,678,750)	323,531,250
3100102009	Tablet PC	87,779,458	(44,298,404)	(18,901,742)	0	(63,200,146)	24,579,312

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3100102999	Personal Komputer Lainnya	61,347,000	(41,723,875)	(7,849,250)	0	(49,573,125)	11,773,875
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	202,707,500	(153,751,244)	(21,662,504)	0	(175,413,748)	27,293,752
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	24,170,500	(15,921,750)	(3,299,500)	0	(19,221,250)	4,949,250
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	357,234,500	(232,350,689)	(43,701,125)	0	(276,051,814)	81,182,686
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	69,421,650	(35,421,650)	(4,250,000)	0	(39,671,650)	29,750,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	91,783,000	(83,785,500)	(2,552,500)	0	(86,338,000)	5,445,000
3100204001	Server	116,400,000	(113,943,750)	(2,456,250)	0	(116,400,000)	0
3100204002	Router	118,198,719	(118,198,719)	0	0	(118,198,719)	0
3100204004	Modem	5,666,100	(4,750,763)	(261,525)	0	(5,012,288)	653,812
3100204030	Network Cable Tester	8,580,000	(8,580,000)	0	0	(8,580,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	92,558,060	(92,558,060)	0	0	(92,558,060)	0
3190106003	Sepeda Olah Raga	22,977,620	(11,488,810)	(7,659,207)	0	(19,148,017)	3,829,603
133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714	(17,472,988,886)	(4,009,233,057)	0	(21,482,221,943)	38,201,608,771
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	56,516,037,780	(16,759,464,830)	(3,842,786,437)	0	(20,602,251,267)	35,913,786,513
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	154,108,000	(55,478,880)	(12,328,640)	0	(67,807,520)	86,300,480
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	481,163,934	(150,508,149)	(41,331,974)	0	(191,840,123)	289,323,811
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1,422,910,000	(260,314,002)	(57,847,556)	0	(318,161,558)	1,104,748,442
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	82,559,000	(11,794,140)	(2,620,920)	0	(14,415,060)	68,143,940
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	383,440,000	(51,506,865)	(11,445,970)	0	(62,952,835)	320,487,165
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	464,163,000	(167,098,680)	(37,133,040)	0	(204,231,720)	259,931,280
4040104001	Pagar Permanen	179,449,000	(16,823,340)	(3,738,520)	0	(20,561,860)	158,887,140
135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559	0	0	0	0	1,088,776,559
6010101001	Monografi	1,088,776,559	0	0	0	0	1,088,776,559
6010101999	Buku Lainnya	0	0	0	0	0	0
6010199999	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	853,242,316	(2,067,932,320)	1,214,690,004	0	(853,242,316)	0
3010305005	Sumersible Pump	229,812,000	(229,812,000)	0	0	(229,812,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	9,395,000	(9,395,000)	0	0	(9,395,000)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	0	(147,000)	147,000	0	0	0
3050105009	Movitex Board	0	(532,000)	532,000	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	0	(283,718,942)	283,718,942	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	(123,049,000)	123,049,000	0	0	0
3050201005	Sice	0	(42,235,000)	42,235,000	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	0	(187,000)	187,000	0	0	0
3050204004	A.C. Split	565,570,316	(1,008,341,498)	442,771,182	0	(565,570,316)	0
3050206002	Televisi	48,465,000	(109,478,580)	61,013,580	0	(48,465,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	(145,000)	145,000	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 09/02/23 6:00 AM
Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	(177,000)	177,000	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	(158,000)	158,000	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	(160,000)	160,000	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	(21,925,200)	21,925,200	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	(12,000)	12,000	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	(4,000)	4,000	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	(4,000)	4,000	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	(135,511,000)	135,511,000	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	(13,970,000)	13,970,000	0	0	0
3100102007	Net Book	0	(59,169,000)	59,169,000	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	(7,700,000)	7,700,000	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	(22,101,100)	22,101,100	0	0	0
JUMLAH		442,549,637,458	(37,606,421,694)	(4,686,840,369)	0	(42,293,262,063)	400,256,375,395

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 09/02/23 9:30 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022					
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
			SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	126,584,000	(79,891,800)	(21,670,600)	0	(101,562,400)	25,021,600
30502	ALAT RUMAH TANGGA	106,231,000	(61,459,400)	(19,895,200)	0	(81,354,600)	24,876,400
30601	ALAT STUDIO	1,760,000	(1,760,000)	0	0	(1,760,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	17,867,000	(16,164,200)	(1,702,800)	0	(17,867,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	726,000	(508,200)	(72,600)	0	(580,800)	145,200
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	(195,800)	195,800	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	(195,800)	195,800	0	0	0
JUMLAH		126,584,000	(80,087,600)	(21,474,800)	0	(101,562,400)	25,021,600

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPPB-E1 : 10

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 09/02/23 9:30 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2022						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
JUMLAH			6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0

